

SUARA dari PINGGIRAN



SUARA DARI PINGGIRAN

Editor

Laode M Syarif, Ahmad Qisai, Arief Nurdiansyah,
M. Gaussyah, Dadang Trisasongko



SUARA DARI PINGGIRAN

Editor

Laode M Syarif, Ahmad Qisai, Arief Nurdiansyah,
M. Gaussyah, Dadang Trisasongko

ISBN :

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA
Telp +62-21-7279-9566
Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>

Daftar Isi Buku

Pendahuluan

Merakit Keluh Kesah Menjadi Perlawanan

Tim Editor	vii
Ada apa dengan Nganjuk?	vii
Dari desa untuk Kabupaten Nganjuk dan Indonesia	ix
Menyemai Perlawanan	x
Sebuah Pilihan	xii

Melawan Korupsi dari Bawah

Cara Pandang Baru	1
Memperkuat Kader Lama, Menunmbuhkan Kader Baru	2

A. Korupsi di Sekitar Kita

Dan Koruptor pun Semakin Berjaya	7
Pungli	8
Harga Sebuah Keterbukaan	8
Korupsi di Sekolah	9
Korupsi itu Dosa Besar	10
Jual-Beli CPNS	10
Kebijakan Desa yang Tidak Berpihak	12
Korupsi di Desa	13
Mimpi Pahlawan Korupsi	14
Korupsi Pembangunan Masjid	16
Menumbuhkan Jiwa Anti Korupsi Sejak Dini	17
Koruptor-Koruptor Gila	18
Pengalamanku Mengikuti Pelatihan Anti Korupsi	19
Pemerintahan Kita adalah Guru Korupsi yang Baik	19

B. Anti Korupsi di Republik Korupsi

Semangat Melawan Korupsi	21
Puasa Korupsi Sebagai Sumpah Jabatan Kepala Desa	21
Korupsi Meresahkan Masyarakat	23
Ampuhnya Dampak Korupsi	24
Bersama Punden Kita Berantas Korupsi	25
Anti Korupsi di Republik Korupsi	25
Awasi Dana Pemerintah	26
Dampak Korupsi dan Korelasinya	27

C. Berjamaah Kami Berantas Korupsi

Cinta Dunia	29
Fenomena Bangsa	30
I Can Stop the Corruption	31
Penanggulangan Korupsi di Indonesia	32
Koruptor Tak Perlu Dilindungi	33
Korupsi itu Menyesakkan	34
Korupsi dan Iman	36
Peranan Sekolah TPA/TPQ	36
Jalan Menuju Korupsi	37
Sifat Keserakahan	38
Metode Penghapus Korupsi	39
Kuman-Kuman Kehidupan	40
Doa Anti Korupsi	41
3 M	41
Korupsi, Ooh..Korupsi	43
Puisi Untukmu	44
Pentingnya Transparansi	46
Jangan Menyerah	46
Reformasi Apalah Gunanya	47
Revolusi Budaya Sebagai Upaya Meminimalkan Korupsi	48
Sepenggal Angan-Angan	50
Dampak Korupsi	51
Wabah Korupsi	52
Bersihkan Hati, Perangi Korupsi	53
Judul-Judulan	54
Lanjutkan Pemberantasan Korupsi	54
Mencegah dari Dalam	56
Korupsi yang Dijadikan Budaya	56
Perlu Mukjizat	57

D. TEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

Hukum Untuk Si Miskin	61
Lucunya Negriku	62
Kemlade (benalu) Desa (Kujual Kambingku)	63
Hukum yang Berkadilan	64
Semut Tak Akan Tersenyum Bila Diinjak	65
Hukumilah Koruptor Dengan Potong Tangan	66
Hukum Apakah Yang Pantas Bagi Koruptor	67
Masalah Korupsi Indonesia	68

Korupsi Penyakit Akut Bangsa	69
Korupsi Sejak Pra Manusia	70
Korupsi dan Solusinya	71
Harus Ada Sosialisasi	72

Merakit Keluh-Kesah Menjadi Perlawanan

Tim Editor

Buku ini adalah buku kumpulan kesaksian dan pandangan masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seputar masalah korupsi. Bukan hanya menyangkut problem-problem korupsi yang telah menjadi perbincangan publik dan dimuat di media nasional maupun daerah, tetapi terutama kesaksian dan pandangan warga desa tentang perilaku korup yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintahan di komunitas mereka sendiri.

Kesaksian dan pandangan tentang korupsi ini tidak dimaksudkan sebagai kesaksian hukum dari para ‘peniup peluit’ (*whistle blower*) dalam rangka membongkar praktik korupsi puluhan milyar rupiah. Pandangan mereka tentang korupsi juga jangan disamakan dengan opini para pengamat dan pakar yang biasanya tinggal di kota dan dengan sudut pandang orang kota.

Di jaman yang terbuka seperti sekarang, setiap orang adalah narasumber yang memiliki legitimasi sepanjang itu menyangkut kepentingan mereka. Kekuatan dari kumpulan tulisan ini justru terletak pada kesederhanaan cara berpikir dan kepolosan pengungkapannya. Persoalan korupsi di desa dilihat dari sudut pandang orang desa dan memandang persoalan korupsi di tingkat nasional dari kacamata orang desa.

Buku ini sesungguhnya tak hendak mengguncang tahta koruptor kelas kakap yang bermandikan harta haram, tetapi lebih menjadi media untuk mawas diri dan sedikit kritik terhadap sikap dan perilaku masyarakat dan para pemimpinnya. Di samping itu, buku ini juga untuk berbagi semangat dan keteguhan dalam melawan korupsi di lingkungan asal para penulis. Adalah satu hal penting apabila kumpulan tulisan ini bisa memantik ide-ide baru untuk melakukan perubahan yang lebih baik, sekecil apapun

Ada apa dengan Nganjuk?

Kabupaten Nganjuk memang unik. Disamping memiliki kerapuhan-kerapuhan dalam tata pemerintahannya, kabupaten yang sebagian besar warganya hidup sebagai petani ini, memiliki potensi politik yang hebat di tingkat akar-rumput.

Seberapa rapuh sebenarnya tata pemerintahan yang sedang bekerja di Nganjuk?

Menurut catatan PUNDEN (Perkumpulan untuk Desa Mandiri), sebuah organisasi nirlaba setempat yang dimotori oleh anak-anak muda berintegritas yang selama ini aktif mendampingi komunitas akar-rumput, menyebutkan bahwa ada 12 orang mantan anggota DPRD periode 2002-2003 yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Uang negara yang mereka *tilep* mencapai Rp 2,6 milyar. Sementara, di jajaran eksekutif, sejak bulan Mei 2010, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mulai melakukan penyelidikan terhadap Pelaksana tugas (Plt) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Nganjuk. Kasus ini berkaitan dengan *fee* proyek sebesar 20%. Sementara Bupati Nganjuk juga sedang diterpa dugaan menyalahgunakan kekuasaannya dalam rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri Sipil). Korupsi juga mulai merambah desa. Pada tahun 2010, Kepala Desa Candirejo Kecamatan Loceret telah ditahan Kejaksaan Negeri Nganjuk karena diduga mengorupsi uang Alokasi Dana Desa (ADD). Terkait desentralisasi dan pemilihan langsung kepala daerah hingga pemilihan kepala desa, permainan politik uang oleh elit politik lokal telah mulai menggoyahkan integritas dan membodohi masyarakat desa.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Nganjuk telah mulai membangun organisasi-organisasi rakyat independen di tingkat akar rumput. Organisasi-organisasi ini terlepas dari kepentingan elit politik lokal dan lebih menyerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat akar rumput, baik yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian dan usaha ekonomi

menengah dan bawah. Geliat organisasi rakyat ini mulai menyebar berbagai desa di hampir semua kecamatan yang ada.¹ Jadi, selain tata pemerintahan lokal yang tengah mengalami pelapukan, Kabupaten Nganjuk juga tengah mengalami lahirnya kekuatan-kekuatan pembaruan yang tumbuh dari bawah. Di sinilah pentingnya Nganjuk sebagai sumber pembelajaran pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil yang bersaing dengan kekuatan arus utama politik yang cenderung abai terhadap kepentingan masyarakat bawah.

Menurut pengalaman dari negara-negara lain, usaha pembersihan dan penataan terhadap pemerintahan yang sangat korup akan berhasil jika ada kekuatan-kekuatan independen yang terkonsolidasi dengan baik di luar pemerintahan, termasuk kekuatan-kekuatan kontrol di tingkat akar-rumput. Dari sudut pandang ini, Nganjuk sesungguhnya menawarkan optimisme bagi lahirnya tata pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Dari desa untuk Kabupaten Nganjuk dan Indonesia

Mereka yang tulisannya dituangkan di dalam buku ini adalah para alumni pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan oleh PUNDEN di Nganjuk pada tahun 2011 dengan bekerjasama dengan Kemitraan. Sebagian besar peserta berasal dari Kabupaten Nganjuk. Ada dua orang dari luar Nganjuk, yaitu dari Malang dan Kediri. Tulisan ini dibuat setelah mengikuti pelatihan tentang gerakan anti korupsi selama tiga hari. Latar belakang para penulis sangatlah beragam. Ada mahasiswa, tani, guru madrasah, pengasuh pondok pesantren, pemuka agama setempat, aktivis kelompok perempuan, pengurus koperasi, aktivis remaja masjid, takmir masjid, dan aktivis organisasi keagamaan. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang

¹ Di dalam laporan PUNDEN tahun 2011, 'Melawan Korupsi dari Bawah', di tingkat kabupaten, organisasi-organisasi rakyat yang berkembang di tingkat pedesaan itu memiliki organisasi induk yang dinamai SERAB (Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit).

dituangkan di dalam tulisan-tulisan di dalam buku ini sangat beragam sebagai cerminan dari latar belakang para penulisnya.

Dengan berbagai gaya penulisan, kesaksian dan pandangan yang dibuat tertuang dalam bentuk tulisan pendek. Bahkan ada yang menuangkannya dalam bentuk puisi. Jika dipilah-pilah, kesaksian dan pandangan para peserta pelatihan anti korupsi ini meliputi beberapa aspek dan bidang, yaitu : i) pandangan seputar masalah korupsi dan penanganannya sesuai dengan latar belakang masing-masing penulis, ii) pandangan tentang beberapa praktik korupsi, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan di sekitar lingkungan tempat tinggal para penulis, baik itu yang menyangkut bidang pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana desa, pertanian dan juga praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, iii) harapan dan rencana-rencana ke depan untuk memerangi praktik korupsi di desanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menyemai perlawanan

Tulisan-tulisan yang terangkum di dalam buku ini mengekspresikan kemarahan para penulis terhadap keadaan tata pemerintahan dan masyarakat yang cenderung memberi ruang bagi berkembangnya korupsi. Tetapi, di sisi lain selalu ada pesan optimisme, yang tersirat maupun tersurat, yang memberikan harapan.

“...Korupsi di Indonesia benar-benar sudah menjadi wabah penyakit kronis yang dapat di istilahkan “pagebluk” yaitu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat secara bersamaan. Disana-sini kita dengan sangat mudah dapat menemukan penyakit ini, baik dikalangan atas maupun bawah. Bahkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk Madin (Madarasah Diniyah) pun tak luput dari ganasnya penyakit ini...” (Korupsi: Penyakit Akut Bangsa, Muh. Bisri, Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk)

Mari kita cermati penggunaan istilah dari salah satu tulisan yang ada di buku ini. Bagi kaum tani di Jawa, istilah ‘pagebluk’ adalah ungkapan yang lazim digunakan untuk menggambarkan tentang wabah hama yang menyerang tanaman mereka yang sulit untuk diatasi. Penggunaan istilah ini untuk menggambarkan tentang masalah korupsi yang ada di lingkungan para penulis sangat mewakili betapa seriusnya ancaman korupsi terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dimana para penulis tinggal. Dalam konteks pertanian di Jawa, istilah ‘pagebluk’ merujuk pada ancaman yang sistemik dan meluas terhadap tanaman mereka yang pada akhirnya mengakibatkan gagal panen. Korupsi menjadi sesuatu yang begitu nyata dan telah merasuk ke bagian paling dalam dari masyarakat, yaitu sesuatu yang berurusan langsung dengan pembentukan karakter, integritas dan keyakinan masyarakat. Korupsi telah merongrong urusan pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Ini sungguh tidak berlebihan. Bukankah korupsi dana milyaran rupiah juga pernah terjadi dalam bidang pengelolaan ibadah haji dan bahkan dilakukan oleh seorang menteri agama yang juga seorang ulama besar? Kita betul-betul sedang dilanda ‘pegebluk’.

Tetapi optimisme juga dibangun melalui spiritualitas. Lihat saja kutipan tulisan di bawah ini.

“... Memang merubah itu tidak mudah. Pasti ada hambatan dan rintangan yang menghadang. Akan tetapi, kalau kita mau mewujudkan sebuah perubahan yang kita cita-citakan, insya Allah Tuhan tetap akan memberikan jalan untuk merubah keadaan. Mungkin karena faktor ekonomi, sumberdaya manusia (SDM) dan masih kurang solidnya organisasi/jamaah/ golongan/perkumpulan. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah sebelum bertempur, walaupun teman perjuangan hanya dengan jumlah sedikit. Jangan kecil hati. Dengan kesungguhan hati dan kerelaan bertindak, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi.” (Jangan Menyerah, Imam Syafawi, Dusun Waungsantren Desan Waung Kecamatan Baron Nganjuk)

Kutipan di atas juga menyiratkan pentingnya kerja-kerja politik untuk melawan korupsi. Yaitu melalui pembangunan kekuatan kritis di masyarakat lewat pendidikan dan pengorganisasian masyarakat. Keluh-kesah memang penting sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap keadaan. Tetapi, keluh-kesah seharusnya bisa diorganisasikan dan diarahkan agar menghasilkan energi besar untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Inilah yang menjadi alasan para aktivis PUNDEN (Perkumpulan untuk Desa Mandiri) ketika memutuskan untuk mengajak Kemitraan untuk menyelenggarakan sejumlah pelatihan anti-korupsi bagi kelompok-kelompok masyarakat dampingannya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Bagi kelompok-kelompok akar-rumput, korupsi adalah sesuatu yang begitu nyata dirasakan dalam hidup sehari-hari. Bagi kelompok ini, korupsi adalah pengingkaran terhadap hati nurani, menodai rasa keadilan, merugikan secara ekonomi dan secara politik adalah bentuk serangan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, korupsi sewajarnya bisa dipahami sebagai musuh bersama masyarakat akar-rumput. Dengan demikian, kehendak untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi seharusnya juga bisa menjadi pijakan dan sekaligus ikatan kebersamaan masyarakat akar-rumput untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil.

Sebuah pilihan

Korupsi, sebagai sebuah cara, bisa dipandang dan disikapi melalui berbagai sudut pandang. Tergantung kepentingan masing-masing. Ada beberapa golongan orang bila didasarkan pada bagaimana orang bersikap terhadap korupsi.

Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang betul-betul menyadari adanya kelemahan sistem. Kelompok ini justru memanfaatkan kelemahan sistem itu untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Kelompok ini juga sangat berkepentingan terhadap kelestarian sistem

yang buruk itu. Kelompok ini bahkan akan mempertahankan mati-matian agar kebobrokan sistem itu tetap terjaga.

Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang dengan terpaksa harus berkompromi dengan sistem yang buruk itu untuk kepentingan mempertahankan standar minimal hidupnya. Kalau ada sistem yang lebih baik, kelompok ini lebih memilih untuk menggunakan sistem yang lebih baik. Kelompok ini tidak menolak adanya perbaikan sistem, tetapi juga tidak berinisiatif untuk melakukan perubahan. Kelompok ini terus berkeluh-kesah, tetap menikmati walau sedikit, dan merasa tak berdaya menghadapi sistem yang buruk.

Kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang yang mengetahui adanya kebobrokan sistem, tidak ingin memanfaatkan, tetapi juga tidak melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan. Kelompok ini memilih untuk menjadi penonton saja. Kalau bisa, lebih baik menghindari masalah daripada menyelesaikan masalah. Kelompok ini berpikir bahwa masalah itu bukan urusannya. Ini adalah tipe penonton.

Kelompok keempat adalah kelompok orang-orang yang resah dengan makin maraknya praktik korupsi. Mereka menganggap korupsi sebagai ancaman langsung maupun taklangsung terhadap kepentingan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kelompok ini aktif menambah pengetahuan tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara memberantasnya. Bahkan, kelompok ini kemudian menyadari bahwa korupsi yang sudah sangat mengakar dan meluas ini tidak mungkin dihadapi sendiri-sendiri. Membangun kerja sama dalam organisasi dan jejaring menjadi kebutuhan utama dalam perlawanan yang dilakukan oleh kelompok ini. Niat baik, pengetahuan yang memadai, organisasi yang dapat menjadi kendaraan bersama serta jejaring yang mampu mempertautkan kekuatan-kekuatan akan menjadi modal utama perlawanan terhadap korupsi. Dan semua itu sedang bertumbuh di Kabupaten Nganjuk. Kita berharap, kelak Kabupaten Nganjuk memiliki

pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab kepada rakyatnya dan ditopang oleh kekuatan rakyat yang kritis dan terorganisasi dengan baik.

Amin.

Melawan Korupsi Dari Bawah

Cara pandang baru

Bagi PUNDEN, program anti-korupsi bersama Kemitraan adalah pekerjaan baru. Akan tetapi, bekerja dengan kelompok akar rumput yang menjadi fokus dari program anti korupsi ini adalah pekerjaan lama PUNDEN di Kabupaten Nganjuk. PUNDEN telah lama bekerja untuk pengembangan ekonomi dan politik di tingkat desa dengan kelompok sasaran pendampingan yang berasal dari anggota masyarakat yang aktif dalam komunitas-komunitas masjid, takmir, guru madrasah dan remaja masjid. Jaringan di tingkat akar rumput ini menjadi pendorong dan fondasi utama bagi PUNDEN untuk mengembangkan dan menjalankan program pendidikan dan kampanye anti korupsi ini.

Temuan fakta di lapangan bahwa ketika PUNDEN berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa untuk lebih berperan dan berpartisipasi di dalam tata kelola pemerintahan di komunitasnya, masalah korupsi acap kali muncul menjadi penghalang. Korupsi tidak hanya terjadi di dalam struktur pemerintahan desa tetapi juga menjadi penyakit yang menjangkiti pola pikir masyarakat yang cenderung menyetujui atau abai terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Praktik korupsi telah begitu dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan dan mengambil bentuk yang bermacam-macam. Misalnya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, penyelewengan penggunaan dana desa, pungutan liar oleh perangkat desa dalam pemberian pelayanan publik atau bahkan praktik politik uang di dalam pemilihan umum kepala daerah. Di Kabupaten Nganjuk, 12 orang mantan anggota legislatif periode 2002-2003 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara mencapai Rp 2,6 milyar. Di level eksekutif, pada Mei 2010, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mulai melakukan penyelidikan terhadap Pelaksana tugas (Plt) Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Nganjuk. Kasus ini berkaitan dengan *fee* proyek sebesar 20% dan rekrutmen CPNS yang diduga melibatkan Bupati Nganjuk. Di tingkat desa, pada tahun 2010 Kepala Desa Candirejo Kecamatan Loceret telah ditahan Kejaksaan Negeri Nganjuk karena diduga melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp 14 juta. Fakta-fakta inilah yang juga menjadi alasan penting pengembangan program ini.

Lebih jauh, program anti korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut memperbaiki sistem pemerintahan yang dalam kenyataannya telah mengalami kerusakan akibat korupsi. Program ini menjadi pelengkap dari program-program PUNDEN dan berhasil menjadi alat penggerak untuk partisipasi publik yang lebih aktif di dalam tata kelola pemerintahan di desanya. Selama pelaksanaan program ini, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program menjadi sadar bahwa korupsi adalah musuh bersama dan melawan korupsi menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di masyarakat. Ke depan, munculnya kesadaran ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi proses konsolidasi masyarakat desa dan organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh subur di Nganjuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatoris dan akuntabel di desa-desa di Nganjuk khususnya dan di tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama juga diharapkan bisa menjadi pijakan bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Memperkuat Kader Lama, Menumbuhkan Kader Baru

Salah satu kunci keberlangsungan organisasi komunitas adalah transparansi. Di Nganjuk, meskipun selama ini tidak ada pelajaran khusus dan langsung tentang transparansi

bagi para pengelola organisasi komunitas, tetapi praktik transparansi pengelolaan organisasi telah dijalankan dengan cukup baik. Pendampingan yang dilakukan PUNDEN telah berhasil mendorong adopsi prinsip-prinsip transparansi di dalam pengelolaan organisasi komunitas, terutama di dalam pengelolaan koperasi komunitas. Akan tetapi, di pemerintah desa, proses tata kelola pemerintahan justeru penuh dengan praktik-praktik yang tidak transparan dan koruptif, mulai dari pembuatan keputusan hingga pengelolaan keuangan desa. Atas fakta inilah program yang dijalankan oleh PUNDEN diharapkan mampu memperkuat kesadaran anggota komunitas dan juga aparat desa untuk mendorong terciptanya transparansi yang lebih baik di dalam tata kelola pemerintahan desa.

Program anti-korupsi yang dijalankan oleh PUNDEN tersebar di 20 desa di Kabupaten Nganjuk yang memiliki lebih dari 200 desa yang tersebar di 20 Kecamatan. Komunitas-komunitas di 20 desa ini adalah komunitas-komunitas yang selama ini didampingi oleh PUNDEN dalam upayanya meningkatkan pemberdayaan ekonomi komunitas melalui pendirian dan pengelolaan koperasi komunitas. Pendekatan bola salju diadopsi oleh PUNDEN dalam implementasi program anti korupsi ini. Harapannya, setiap desa yang didukung melalui program ini akan menghasilkan kader/penggerak atau orang yang memiliki daya pengaruh di komunitas mereka yang bisa menularkan pengetahuan dan pemahaman tentang gerakan anti korupsi yang diterima selama mengikuti program ini.

Demi tujuan ini, PUNDEN memilih orang-orang yang selama ini telah menjadi penggerak/kader komunitas dalam usaha PUNDEN untuk memberdayakan masyarakat desa di Nganjuk. Biasanya orang-orang ini tidak banyak bicara tetapi lebih banyak bekerja sehingga lebih disegani dan didengar oleh anggota komunitas yang lain. Para penggerak/kader ini bisa laki-laki/perempuan dan bisa berprofesi sebagai pedagang atau petani. Artinya siapa saja bisa menjadi penggerak/kader di dalam kegiatan ini. Tetua masjid, guru, dan ustad di kampung adalah beberapa contoh penggerak/kader yang selama ini terlibat di

dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PUNDEN. Orang-orang ini pulalah yang kemudian diajak PUNDEN untuk mendukung kesuksesan implementasi program anti korupsi yang dijalankan.

Strategi bola salju dengan menggunakan para penggerak/kader ini terbukti telah membantu PUNDEN selama hampir empat tahun terakhir dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Para penggerak/kader ini kemudian menjadi “pekerja inti” dan urat nadi pengorganisasian komunitas yang bisa membuat program kerja berlanjut terus-menerus tanpa harus selalu tergantung kepada dukungan dana dari lembaga penyantun dana. Kepiawaian para kader/penggerak ini dalam pengelolaan dana swadaya melalui koperasi menjadi kunci sukses pengorganisasian yang dilakukan oleh komunitas yang didampingi PUNDEN

PUNDEN bekerja dengan kader-kader dari pedesaan dari komunitas masjid, baik sebagai takmir, remas, guru madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA). Kurang lebih 75 kader terlibat aktif dalam pelatihan yang dilakukan PUNDEN melalui program ini. Para kader komunitas masjid ini dibekali dengan kesadaran baru tentang pentingnya gerakan anti korupsi untuk mendorong munculnya prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas di masing-masing komunitasnya.

Sebagai usaha penguatan kapasitas para kader dalam advokasi gerakan anti korupsi, PUNDEN mendorong keterlibatan aktif media lokal, baik elektronik, online maupun cetak, dalam memfasilitasi penyampaian ide-ide orisinal gerakan anti korupsi di tingkat akar rumput. Selain itu, kader yang terbiasa menggunakan ICT (*Internet and Computer Technology*) mengunggah tulisan mereka di jejaring sosial seperti *Facebook*, *blog* atau grup milis. Respons positif atas inisiatif ini muncul dari SERAB (Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit) untuk membuat pelatihan ICT bagi kader SERAB agar mereka juga bisa melakukan kampanye lebih luas. Pelatihan ini sekaligus diarahkan untuk mengunggah tulisan mereka di www.korupsiana.com yang dikelola SIDAK

Jogja (Sentra Informasi dan Data Anti Korupsi). Secara berkala, tulisan kader juga dipublikasikan setiap dua minggu sekali di koran Fajar Nusantara juga oleh situs *online* lainnya seperti www.beritajawa.com dan www.aksesberita.com.

Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di akar rumput, PUNDEN mempunyai jaringan kuat di Kabupaten Nganjuk. GMNU (Gerakan Masyarakat Nahdlatul Ulama), Paguyuban Mandiri (PAMAN), PGS (Paguyuban Gotong Royong Sejahtera), KPM-Anjuk Ladang (Kelompok Pemuda Mandiri Anjuk Ladang), KPRM (Koperasi Perempuan Rejo Makmur Tegalrejo), IPM (Ikatan Pedagang Mbaduk Desa Malangsari), Kelompok Perempuan Annajwa dan Koperasi Kumandang adalah jejaring organisasi komunitas di tingkat desa dan kecamatan yang selama ini mempunyai ikatan kerja yang kuat dengan PUNDEN. Pada saat yang sama, SERAB (Serikat Rakyat Anjuk Ladang Bangkit) menjadi sebuah organisasi payung di tingkat kabupaten yang memfasilitasi koordinasi kerja bersama di Kabupaten Nganjuk. Dengan jaringan ini, pelaksanaan program anti korupsi yang dikerjakan oleh PUNDEN bersama Kemitraan mendapatkan dukungan yang kuat dan partisipasi yang tinggi dari semua elemen masyarakat. Kader-kader lama yang selama ini bekerjasama dengan PUNDEN menjadi lebih mengerti tentang isu anti korupsi dan pada saat yang sama, kader-kader baru juga muncul untuk mendukung keberlanjutan gerakan anti korupsi di Kabupaten Nganjuk.

Beberapa inisiatif kegiatan mandiri telah dilakukan oleh para lulusan pelatihan anti-korupsi yang diselenggarakan oleh PUNDEN, mulai dari kegiatan individual seperti pengiriman surat protes pada praktik pungutan liar di kepolisian, khutbah Jumat yang mengedepankan prinsip-prinsip anti korupsi dari sudut pandang Islam hingga kegiatan kolektif berupa penyelenggaraan Pawai Kejujuran.

Layar telah terkembang. Para kader kembali ke komunitas mereka masing-masing dengan membawa cara pandang baru tentang korupsi dan bagaimana harus menghadapinya. Di

dunia nyata yang penuh dinamika inilah komitmen mereka diuji. Semoga mereka bisa menjadi pelopor perubahan untuk kebaikan di komunitasnya khususnya dan Indonesia.

A. Korupsi di Sekitar Kita

Dan Koruptor pun Semakin Berjaya

Saya adalah anggota sebuah organisasi di desa. Di dalam organisasi ini, diduga terjadi penyelewengan/penyalahgunaan dana kas organisasi oleh bendahara untuk kepentingan pribadi. Dugaan ini semakin menguat karena pembukuan keuangan organisasi ini tidak transparan.

Walaupun telah jelas bahwa sang bendahara ini melakukan tindak korupsi, tetap saja belum ada tindakan dari semua pengurus organisasi. Hingga sang bendahara pun mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, yang disayangkan dana yang selama ini disalahgunakan tidak dikembalikan (dalam artian diihklaskan begitu saja tanpa ada sanksi yang diberikan). Dan yang lebih mengherankan lagi, setelah bendahara ini melepas jabatannya sebagai, ia justru menjadi seorang kaki tangan atau orang kepercayaan pejabat di daerahku. Kalau kita pikirkan, anak buahnya saja suka korupsi, bagaimana dengan atasannya yang lebih punya peluang dan kesempatan.

Dengan kata lain, orang yang punya jejak seperti itu saja ternyata masih dipercaya oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Seharusnya orang-orang seperti itu mendapat sanksi sosial, misalnya dengan menjauhkannya dari jabatan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sebab, mereka terbukti telah gagal mengemban amanah yang diberikan rakyat. Sanksi sosial bisa jadi lebih menyakitkan daripada sanksi hukum.

Asmak Mudayana Tunafi, Desa Sawahan Lengkong Nganjuk

Pungli

Di jaman sekarang, mendapatkan pekerjaan yang layak itu tidak mudah. Celaknya, dalam situasi seperti itu, selalu saja ada orang yang memanfaatkan celah-celah yang ada untuk memungut pungutan liar (pungli) dari mereka yang sedang mengurus kelengkapan administrasi dari desa untuk mencari pekerjaan.

Contohnya ketika mengurus sertifikat tanah, belum apa-apa sudah membayar ini dan itu. Kalau masyarakatnya bertanya untuk apa biaya itu, selalu dijawab dengan nada yang mengancam. "Kalau tidak mau membayar ya sudah, kamu urus sendiri". Itulah kata-kata yang sering digunakan oleh para pejabat di desa yang sesungguhnya memanfaatkan ketidaktahuan warga dalam pengurusan akte.

Sungguh menyakitkan. Tapi harus bagaimana lagi, karena cara pengurusannya pun dipersulit. Akhirnya kebanyakan warga yang tidak paham dengan seluk-beluk mengurus, akte karena kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah, menjadi tak berdaya. Mereka harus pasrah, yang penting bisa mendapatkan sertifikat.

Zulaikan, Desa Kelutan Ngronggot Nganjuk

Harga Sebuah Keterbukaan

Keterbukaan pasti dibutuhkan sebuah organisasi atau lembaga. Begitu pula dalam organisasi seperti kelompok tani di desa. Di sebuah desa, katakan saja Desa Sendang, terdapat penyelewengan dana untuk petani. Seperti adanya subsidi pupuk, subsidi benih padi jagung dan bantuan diesel, yang seharusnya diperuntukan bagi kelompok tani tersebut, ternyata dijual dan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari keterangan diatas jelas bahwa transparansi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial atas kelompok tersebut dan tidak ada prasangka buruk diantara anggota kelompok kepada pengurus kelompok tani maupun anggota lainnya. Hal ini penting ditanamkan dalam jiwa dan semangat kelompok tani agar terjadi transparansi dalam penggunaan bantuan maupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani yang selanjutnya dapat menutup celah terjadinya penyelewengan dana di kelompok tani.

Zulaikah, Desa Kemlokolegi Baron Nganjuk

Korupsi di Sekolah

Di sekolah anak kami, banyak dana siswa yang digunakan untuk kepentingan pihak guru sendiri. Saya heran, mengapa anak saya masih harus membeli buku-buku pelajaran walau sekolah itu menerima bantuan dari pemerintah, misalnya bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Hal seperti ini tidak terjadi di sekolah lain yang juga menerima bantuan yang sama.

Hal ini menjadi bukti dan menimbulkan pertanyaan besar bagi kami sebagai orang tua siswa. Dana ini bantuan BOS tersebut dikemanakan oleh pihak sekolah karena kami tetap harus membayar untuk buku dan sebagainya. Jika kondisi ini tidak dijelaskan kepada orang tua siswa dan pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan secara transparan, terutama kepada orang tua murid hal ini bisa merugikan semua pihak. Tidak saja bagi orang tua, murid akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Banyak siswa yang mau belajar tidak ada buku bacaan. Itupun kalau kita beli, baru mendapatkan buku. Kalau tidak ya tetap dikasih oleh pihak sekolah tapi harus mengutang. Memang di sekolah anak kami sedang membangun gedung baru sekolah, itupun katanya dana sudah ada sendiri. Kalau sekolah lain

untuk buku-buku tidak membeli karena sudah ada dana BOS, mestinya di tempat kami juga gratis.

Sulastri, Desa Watudandang Prambon Nganjuk

Korupsi itu Dosa Besar

Korupsi adalah penyelewengan terhadap amanah rakyat. Korupsi banyak terjadi dimana-mana. Di pemerintah desa, daerah, pusat bahkan dari yang paling kecil ditingkat RT, RW dan dusun. Seperti halnya di desa kami, dana Alokasi Dana Desa (ADD), dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana kas desa kurang transparan penggunaannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun juga tidak tahu secara jelas kemana dana-dana itu disalurkan. Pendek kata, mereka tidak mau tahu terhadap semua penyimpangan itu. Padahal masalah seperti itu seharusnya berada dalam pengawasan mereka.

Saya berkeyakinan bahwa korupsi adalah dosa besar yang patut untuk dilaknat, karena korupsi ini sama dengan mencuri hak orang lain.

Yurnalis Setyowati, Baron Nganjuk

Jual-Beli CPNS

Jawa timur adalah salah satu propinsi yang tingkat korupsinya paling tinggi di antara propinsi lain di Indonesia. Terbukti dari 156 kepala daerah yang bermasalah di Indonesia, sebagian besar adalah kepala daerah berasal dari Jawa Timur, baik yang sudah tersentuh oleh hukum maupun yang belum.

Selain itu korupsi merupakan hal yang sudah sangat dikenal di masyarakat. Sebab korupsi sudah merajalela dan mengakar di masyarakat. Mulai dari tingkat dusun hingga kabupaten. Tak terkecuali kabupaten Nganjuk. Semuanya seolah tidak lepas dari korupsi. Korupsi tidak hanya menyaplok uang. Tetapi juga makan tanah. Memakan waktu. Mau jadi pegawai negeri sipil pun tak luput dari korupsi. Dalam hal perekrutan PNS di Kabupaten Nganjuk merupakan daerah atau kabupaten yang sangat terang benderang dalam hal jual beli Surat Keputusan (SK) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Asal punya uang SK CPNS pun bisa kita pegang dengan mudah.

Sepentahun saya serta dari beberapa informasi yang saya peroleh, konon harga SK CPNS di Nganjuk sangat bervariasi. Konon, besarnya mulai dari Rp. 120 juta – Rp. 170 juta. Tergantung tingkat pendidikannya, Pemegang ijazah SMU sampai sampai Sarjana "harganya" kisaran Rp. 120 juta – Rp. 150 juta, dan biasanya masih harus mengikuti tes. Sedangkan bagi mereka yang setuju dengan harga Rp. 170 juta tidak perlu mengikuti tes, alias tinggal menunggu SK saja.

Dalam praktiknya, semuanya sangat terbuka, yaitu mulai dari menawarkan SK. CPNS dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang baru lulus sekolah wisuda atau kuliah. Praktek ini dilakukan melalui calo-calo di sekolah-sekolah, dinas-dinas, hingga di LBB (Lembaga Bimbingan Belajar). Dan praktek korupsi di rekrutmen CPNS ini merupakan lahan yang sangat menjanjikan, menggiurkan, dan dengan kesan sangat aman, apalagi setelah adanya otonomi daerah. Apapun yang diputuskan kepala daerah (bupati) merupakan kebijakan daerah. Inilah yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam korupsi rekrutmen CPNS ini. Apalagi dengan antusiasme yang sangat besar dari masyarakat Nganjuk sendiri yang pikirannya kebanyakan masih sangat tradisional dan kolot (maaf agak kasar) berapapun tarif yang dipasang pasti dibayar asal punya uang.

Sebagai masyarakat Nganjuk, saya sangat perihatin dan kecewa, dimana masih berlangsungnya praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dan lingkungan kita sendiri. Dalam hati saya selalu bertanya: Masih adakah pejabat/pemimpin adil, arif dan benar di Kabupaten Nganjuk ini? Masih adakah pejabat penegak hukum yang bisa dipercaya dan memiliki kredibilitas tinggi di Kabupaten Nganjuk ini ?, Adakah ormas-ormas atau LSM yang peduli dengan keadilan dan kebenaran di Kabupaten Nganjuk ini? Kabupaten Nganjuk akankah akan jaya seperti mottonya (Baswara Yudha Karana), apakah uang dan materi yang berkuasa dan berjaya dan mengalahkan kebenaran di Kabupaten Nganjuk yang tercinta ini?”.

Anang Wijayawan, Ngangkatan Rejoso Nganjuk

Kebijakan Desa yang Tidak Berpihak

Suatu kejujuran, ketertiban dan tanggungjawab ternyata mahal harganya untuk kepemimpinan saat ini. Padahal seharusnya kejujuran, ketertiban dan tanggung-jawab merupakan harga mati untuk sebuah kebijakan. Di desa di sekitar tempat tinggal saya, saya merasakan sudah tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Itu karena tidak adanya kejujuran dan tanggungjawab tentang keputusan dan pelaksanaan keputusan yang diberikan kepada masyarakatnya. Terutama dalam hal pelayanan masyarakat, seperti pelayanan administrasi pembuatan KTP, sertifikat tanah, dan surat-menyurat lainnya.

Surat menyurat apapun semua biaya dibebankan kepada masyarakat. Itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama dan molor dari kesepakatan. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh aparatur desa yang seharusnya melayani masyarakat.

Dengan telah mendapatkan berupa tanah *bengkok* (gaji dalam bentuk tanah garapan), seharusnya dia tidak boleh lagi memungut uang dari masyarakat. Inilah bobroknya mental dan nurani perangkat desa.

Nasisus Sifa', Bodor Pace Nganjuk

Korupsi di Desa

Saya sebenarnya belum tahu banyak tentang korupsi, akan tetapi saya berusaha dengan apa yang saya ketahui tentang korupsi. Di desa kami ada semacam kebiasaan apabila ada orang mau pergi ke sawah atau pulang dari sawah mampir dulu di warung untuk melepas penat sehabis seharian bekerja sambil menikmati kopi dan hidangan yang ada. Warung-warung adalah tempat bersosialisasi masyarakat membicarakan banyak hal mulai dari pertanian, perdagangan, harga sembako sampai pada situasi desa dan masalah korupsi.

Di desa kami memang sering mendapatkan bantuan untuk pembangunan dalam setiap tahunnya. Akan tetapi saya dan orang-orang yang biasa ngobrol di warung belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah. Jalan-jalan di dusun kamipun masih belum beraspal padahal menjadi jalur utama yang menghubungkan ke desa lainnya. Kami tidak tahu apakah selama ini sebenarnya sudah ada dana untuk membangun atau belum. Juga belum pembagian yang merata dalam pemberian bantuan beras bagi orang miskin, bahkan jumlahnya dikurangi. Hanya ini yang kami pahami terkait dengan korupsi, semoga nanti dalam pelatihan saya akan banyak tahu tentang sebab akibat korupsi, dan siapa saja yang bisa korupsi.

Menyuap juga sudah biasa di dusun kami. Hal ini biasa dilakukan ketika ada warga yang mengurus surat, membuat KTP, minta izin kerja atau membuat Kartu Keluarga pastilah dipungut biaya mahal. Kondisi ini sudah berlangsung lama, warga sendiri tidak

tahu sebenarnya berapa rupiah untuk mengurus surat-surat itu sehingga warga hanya bisa memberi uang sebesar yang diminta oknum pamong desa yang menguruskan surat tersebut.

Itulah yang terjadi di dusunkami. Mungkin hal ini juga terjadi di daerah lain. Semoga dalam pelatihan nanti saya akan banyak mendapatkan ilmu dan bisa tahu tentang korupsi untuk diberitahukan kepada saudara dan teman-teman agar nantinya sedikit demi sedikit korupsi di dusun kami bisa berkurang.

Iman Kuwait, Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk

Mimpi Pahlawan Korupsi

Di sebuah desa ada pemuda yang bermimpi atau bercita-cita memberantas korupsi. Menurut dia, korupsi adalah penyakit yang harus disembuhkan, ditumpas sampai ke akar-akarnya. Pemuda ini terlahir dari keluarga terpandang. Dikatakan terpandang karena keluarganya banyak yang menjadi aparat pemerintah. Ada yang jadi RT, RW, Pamong, polisi dan bahkan salah satu keluarganya (kakak) adalah seorang camat.

Di suatu hari pemuda tersebut mengurus KTP dan SIM. Diawali dengan mencari surat pengantar dari pak RT. Dalam usaha ini pemuda tersebut dimintai uang rokok oleh ketua RT nya, pemuda tadi bilang: "Tidak punya uang pak". Ketua RW juga begitu. Dan dia pun menjawab, bahwa dia tidak punya uang. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan surat pengantar dari ketua RT dan RW untuk diteruskan ke kepala dusun (kasun). Dia selalu saja menghadapi permintaan yang sama. Seperti sebelumnya, dia selalu jawab, bahwa dia tidak punya uang untuk permintaan itu.

Akhirnya, dengan mulus pemuda tersebut mendapatkan surat pengantar dari RT sampai Kepala Desa. Dia tidak mengeluarkan uang sepersenpun. Dia melnjautkan

pengurusannya ke kantor kecamatan. Celaknya, di tengah perjalanan dia kena razia polisi dan polisi pun menghentikan pemuda itu, "Selamat pagi..dik...tolong keluarkan SIM, STNK nya?" tanya polisi berwajah sangar ini. Lalu dengan santai pemuda itu menjawab, "Belum punya Pak"...Lalu polisi itu bertanya lagi kepada pemuda tadi: "Tilang atau Titip"?. Dengan santai pemuda tadi menjawab : "Tidak punya uang, pak". Akhirnya polisipun berkata: "ya sudah, ditilang saja!". Tapi pemuda tersebut menjawab: "Jangan, pak". Akhirnya pemuda tadi pun lolos dari "denda" maupun tilang. Ternyata polisi yang merazia tadi membiarkan dia untuk meneruskan perjalanan.

Setelah sampai di kantor kecamatan, pemuda tadi langsung bergegas menuju loket bagian pembuatan KTP. "Cari apa, dik"? tanya petugas pada pemuda itu. "Cari KTP pak. Pegawai kecamatan itupun menawarkan kalau biaya membuat KTP itu Rp. 100.000; namun pemuda tersebut hanya punya uang Rp. 20.000;.

Akhirnya dengan tangan hampa pemuda itupun pulang tanpa mendapatkan KTP. Dengan wajah lesu pemuda tadi keluar ruangan pegawai kecamatan tadi. Tampak di luar ruangan kerja pegawai tersebut banyak anak-anak bermain sambil berlari-lari membawa balon. Tiba-tiba menabrak pemuda tadi, dan balon yang dibawanyapun meletus. Anak kecil tadipun menangis dan pemuda tadipun kaget dan jatuh. Astaga, ternyata hanya mimpi.

Tapi tentunya banyak hal yang perlu kita petik dari cerita mimpi pemuda tersebut, bahwa ternyata pungli, korupsi itu sudah menjalar dari tingkat paling bawah RT. Inilah realitas di masyarakat kita.

Mu'alim, Desa.Garu Kec. Baron Nganjuk

Korupsi Pembangunan Masjid

Di sebuah desa, ada pembangunan masjid yang telah menghabiskan dana sekitar Rp. 300 juta. Akan tetapi, sampai sekarang pembangunannya belum dilanjutkan karena tidak adanya kesepahaman di antara pengurusnya. Padahal pembangunan masjid tersebut masih memerlukan bantuan donatur karena masih banyak pengeluarannya yang belum terbayarkan.

Dalam situasi seperti ini yang muncul kemudian justru gagasan-gagasan yang tidak benar dan saya anggap sebagai tindakan yang menyalahgunakan harta jariah masjid.

Pertama, ada yang mulai menjual kayu bekas bangunan serambi masjid. Uangnya tidak tercatat entah kemana. Oleh ketua takmir beserta anggotanya dana ini tidak dilaporkan kegunaannya. Kedua, sisa dana pembangunan masjid disalurkan untuk apa dan kemana saja tidak dilaporkan secara terbuka ke masyarakat yang telah memberikan sumbangan atau amal jariah kepada masjid. Ketiga, pengajuan proposal atas nama pembangunan masjid sudah disepakati sebelumnya. Akan tetapi dana yang didapatkan dari pengajuan proposal tersebut justru digunakan atau dialihkan untuk kepentingan MI/TK. Menyangkut hal ini, ketika dipertanyakan dana tersebut, katanya untuk pembangunan keseluruhan. Keempat, penyalahgunaan jariah kampung setiap Kamis sore diambil oleh pengurus masjid. Namun, nyatanya dananya digunakan untuk membayar guru-guru MI yang memakai tanah wakaf masjid di masukkan ke Yayasan MI (madrasah Ibtida'iyah). Selanjutnya para donatur untuk masjid dan membantu ustadz ustadz TPA atau madin disalahgunakan untuk membiayai MI.

Kesimpulan saya adalah : tindakan-tindakan seperti ini sangat berpotensi menjadi penyelewengan atau korupsi dengan jalan memanfaatkan bantuan untuk masjid demi kepentingan kemajuan madrasah. Dalam hal ini saya sangat tidak setuju dengan tindakan yang menyalahi hukum. Seharusnya pengurus

masjid itu diberhentikan dari jabatannya sampai ada kejelasan laporan penggunaan dana pembangunan masjid agar praktek korupsi di lingkungan masjid bisa dicegah dengan cara yang tepat.

Sanji Majid, Desa Malangsari Tanjunganom Nganjuk

Menumbuhkan Jiwa Anti Korupsi Sejak Dini

Maraknya praktik korupsi di segala bidang di negeri ini membuat saya menjadi miris untuk mendengarnya. Instansi pemerintah sudah hampir semua melakukannya. Mulai dari masalah terkecil dalam pengurusan KTP sudah terjadi pungli atau dengan istilah lain uang bensin untuk mempercepat prosesnya. Itu baru di tingkat pemerintah desa belum ke pemerintahan yang lebih tinggi. Terutama di pemerintahan/dinas yang banyak melakukan kegiatan proyek pembangunan. Padahal pada dasarnya, setiap bulan, aparat tersebut sudah mendapatkan gaji yang pasti dari hasil pekerjaannya.

Sungguh sudah bobrok mental para pejabat di negeri kita ini. Sepertinya dari awal sudah di tanamkan jiwa untuk korupsi. Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah mereka yang saat ini melakukan korupsi, mungkin ketika dulu mereka mendapatkan pekerjaan tersebut, harus menyetorkan uang secara terang-terangan dengan nominal yang tidak sedikit alias memberikan sogokan kepada tim seleksi calon PNS.

Maka dari itu, kita harus berani melawan dan menolak cara perekrutan CPNS yang penuh dengan permainan uang. Kita harus mendorong diterapkannya perekrutan pegawai yang didasarkan pada keahlian, bukan berdasarkan uang. Tes atau ujian masuk yang tidak direayasa. Jadi, nantinya akan benar-benar menghasilkan pegawai atau pemimpin yang tidak mempunyai watak korup.

Koruptor-Koruptor Gila

Judul ini saya pilih karena istilah ini mencerminkan masalah yang ada di desa kami. Dalam tulisan ini saya ingin menyoroti masalah yang ada di desa kami, yaitu ketika ada pelayanan pembuatan sertifikat massal (pemutihan sertifikat tanah). Menurut aturannya tidak ada pungutan apapun, akan tetapi dari kecamatan memberi wewenang kepada perangkat desa untuk meminta pungutan kepada warga. Kewenangan dan kesempatan inilah yang digunakan pamong (perangkat desa) untuk memungut biaya seenaknya saja pada warganya dengan tidak wajar. Berbeda dengan desa-desa yang lain, warga tetap mau membayar pungutan itu karena banyak warga yang berpikiran bahwa, kalau dengan mengurus sendiri biayanya akan semakin mahal dan butuh biaya jutaan rupiah.

Bukan itu saja, para perangkat juga melakukan pungli dengan menambah biaya sebesar 10% dari total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikat. Ini diberlakukan kepada warga yang ingin membuat sertifikat di luar kuota yang ditetapkan. Akan tetapi setelah warga memenuhi persyaratan, termasuk biaya pembuatan sertifikat ini, sertifikat yang di nantikan tak kunjung selesai. Akhirnya wargapun melakukan protes. Dan ternyata uang pungutan dari warga untuk membuat sertifikat tersebut justru digunakan oleh sekdes dan kepala desa untuk kepentingannya sendiri. Sampai saat ini hanya yang sesuai dengan kuota yang sudah selesai sertifikatnya, sementara yang diluar kuota secara otomatis belum selesai.

Kelambanan pembuatan sertifikat ini kembali mengundang dari masyarakat. Protes itu ditujukan terutama kepada sekretaris desa, akan tetapi selalu janji, dan akhirnya wargapun hanya bisa menunggu. Entah sampai kapan warga harus menunggu?

Wiwin Kayatu Rodiyah, Desa Gebangkerep Baron Nganjuk

Pengalamanku Mengikuti Pelatihan Anti Korupsi

Ilmu yang saya dapatkan dari mengikuti pelatihan tentang korupsi ini adalah bahwa, korupsi itu banyak sebab dan akibatnya. Dampak negatif dari korupsi adalah merugikan banyak orang, terutama rakyat yang seharusnya menjadi sasaran dana yang dikucurkan pemerintah, yang ternyata dikurangi (dikorup) oleh oknum yang tidak peduli terhadap masyarakat

Korupsi yang ada di sekitar kita adalah korupsi tentang dana pemerintah yang dikucurkan di desa. Praktik korupsi yang saya ketahui contohnya adalah penyelewengan dana PNPM dan pengambilan jatah beras untuk rakyat miskin. Ini sungguh-sungguh tindakan yang kejam.

Hikmah yang dapat saya ambil dari pelatihan anti korupsi adalah kurangnya tindak lanjut dari upaya pemberantasan korupsi yang selama ini selalu lolos dari jeratan hukum. Akan tetapi bagi si miskin yang hanya mengambil buah dikebun milik orang harus dipenjarakan selama beberapa bulan dan membuat masyarakat kecil semakin miskin seperti lagunya Bang Haji Rhoma Irama: " yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin..."

Nanik Sri Rahayu,, Desa Gebangkerep Baron Nganjuk

Pemerintahan Kita adalah Guru Korupsi yang Baik

Di zaman yang serba sulit ini banyak orang mencari kekayaan dengan dengan segala cara, walaupun itu merugikan orang lain. Guru yang baik dalam hal ini adalah pemerintah yang tiap hari mengajarkan korupsi kepada rakyat. Bagaimana tidak? Setiap hari masyarakat disuguhi adegan korupsi yang dilakukan oleh aparatnya sendiri. Begitu pula dengan orang-orang yang sangat memahami hukum sangat asyik bermandikan kekayaan hasil korupsi. Baik mereka yang berprofesi sebagai pengacara maupun

pengegak hukum lainnya yang juga menikmati kekayaannya dari hasil korupsi atau karena membela orang koruptor.

Semua serba bisa dilakukan, asalkan memiliki uang dan kekuasaan. Sehingga dengan beragam cara menyangkut korupsi yang telah dilakukan disiasati dengan hukum yang dilemahkan. Hal ini tidak tabu lagi dibicarakan oleh masyarakat. Mereka yang korupsi tidak malu jika diberi sanksi sosial oleh masyarakat. Mereka hanya peduli dengan uang dan kekayaan.

Sementara pemerintah seolah berkata lantang tentang pemberantasan korupsi. Seperti janji manis yang berbuah pahit. Itulah keburukan pemerintahan kita saat ini, yang kurang tegas dan keras dalam memberantas korupsi, sehingga semakin mengakar dikalangan pejabat tinggi maupun rendahan dengan dalih “tidak ikut kondangan ya tidak dapat berkatan”.

Maka dari itu, masyarakat kecil pun akan menirukan apa yang dilihat dan didengar dari figur-figur mereka di pemerintahan yang seharusnya bisa dibuat contoh yang baik bagi masyarakat kecil. Akan tetapi membuat masyarakat yang sebelumnya bodoh akan hal itu, untuk saat ini malah di ajari. Sehingga akan semakin pandai dan mengerti karena uang akan menjadi segala-galanya bagi kehidupan kita. Tak peduli cara mendapatkannya dengan jalan baik atau sesat. Sehingga dengan cara korupsi, kita mudah mendapatkan kekayaan dan terpenuhi nya semua keinginan dengan mengatur hukum.

Mamlu'ah, S.Pd., Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk

B. Anti Korupsi di Republik Korupsi

Semangat Melawan Korupsi

Setelah saya mempelajari tentang apa saja yang di maksud dengan korupsi, saya bisa menyimpulkan bahwa, korupsi itu sama dengan pencurian, penodaan terhadap amanah dan identik juga dengan pengkhianatan terhadap wewenang.

Maka mulai saat ini, saya akan berusaha dengan semampu mungkin untuk meneliti, mendeteksi, serta mengidentifikasi, mana dan apa saja yang termasuk tindak korupsi dan selanjutnya berusaha mengatasinya dengan cara terlibat dalam membuat dan mengawasi aturan-aturan yang ada, minimal di tingkat desa.

Secara pribadi, saya akan berusaha untuk, mengantisipasi pada diri saya sendiri agar tidak tergoda melakukan korupsi. Setelah itu, hal yang sama saya tujukan kepada siapa saja yang ada di sekitar saya. Bersama-sama dengan Punden kita kurangi korupsi.

Sujianto, Desa Gemenggeng Pace Nganjuk

Puasa Korupsi Sebagai Sumpah Jabatan Kepala Desa

Apa jadinya jika seorang kepala desa, yang baru saja dipilih oleh rakyatnya, mengucapkan niatan puasa sebagai tambahan dari sumpah jabatannya. Sumpah jabatan itu biasanya dibacakan saat pelantikan yang biasanya juga disaksikan oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan segenap lapisan masyarakat.

Mungkin hal itu terdengar lucu. Mungkin juga akan membingungkan bagi mereka yang hadir pada pelantikan tersebut, sekalipun sang kepala desa mengucapkan niatan puasa itu dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya niatan puasa yang diucapkan adalah bentuk dari penolakan terhadap praktek korupsi yang selama ini banyak terjadi di lingkungan desanya. Sumpah dan niatan ini harus didasarkan pada kesadaran bahwa, korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan norma-norma agama dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta merugikan bagi masyarakat banyak.

Jadi, kepala desa yang baru dipilih tersebut menggunakan momen pelantikannya sebagai ikrar agar dia nantinya dalam mengemban amanat dari masyarakatnya bisa berlaku jujur dan adil. Dia berikrar untuk berpuasa atau tidak memakan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sebagai kepala desa dia berharap dengan sikapnya ini bisa membawa dampak yang baik bagi aparat desa yang akan di pimpinnya nanti. Sehingga membawa kemajuan untuk desa dan membawa kemakmuran bagi masyarakat.

Jika niatan puasa korupsi ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari, tentu kita bisa mengendalikan diri terhadap godaan korupsi. Ini bisa diterapkan pada diri kita sendiri, meskipun kita tidak menjadi seorang kepala desa ataupun pejabat yang mempunyai kewenangan di pemerintahan. Dengan adanya pengendalian terhadap diri kita sendiri, diharapkan nantinya bisa mempunyai pengaruh terhadap orang-orang sekitar dan lingkungan kita.

Hasan Bashori, Desa. Sukolilo Wajak Malang

Korupsi Meresahkan Masyarakat

Bangsa ini adalah bangsa yang paling korup, baik lapisan atas sampai lapisan bawah. Karena inilah aku tidak suka melihat orang-orang yang sedih mendengarkan kata-kata korupsi seperti di desa-desa. Seperti di saat masyarakat banyak membutuhkan pupuk, oknum-oknum banyak yang memanfaatkan untuk menaikkan harga. Kami juga berupaya, bersama saudara, teman, tetangga hingga para sahabat masyarakat tidak melakukan korupsi.

Kami pun ingin korupsi yang ada di desa kami bisa diberantas. Akan tetapi, saat ini kami belum berani secara terang-terangan, karena selama ini kami belum kompak dan belum mempunyai kekuatan untuk melawan korupsi di desa kami. Kami bisa memberantas korupsi kalau kita bisa kompak. Seperti lagunya Gayus Tambunan: "...andai aku Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali...pasti keinginanku bisa tercapai". Mungkin lirik lagu itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nama Gayus senantiasa lekat dengan gaya hidup bersantai-santai tanpa merasa ada beban, walau sudah memakan uang rakyat, memakan uang wong cilik dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Demi kepuasan dia menghalalkan segala cara.

Akan tetapi pemerintah tidak mampu menindak para koruptor meskipun sudah tertangkap. Belum di hukum bahkan masih bisa plesiran dan senang-senang dalam penjara. Inilah potret buram negara hukum kita. Banyak celah mensiasati hukum bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan banyak uang. Oh Gayus..oh Gayus kapan aku bisa ketemu biar kujitak kepalamu, kujambak rambutmu, kuhantam kepalamu dengan tinjuku.

Selama ini rakyat kecil selalu menjadi korban, sudah miskin semakin tambah miskin. Untuk itu kami ingin memberantas korupsi karena sudah meresahkan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa.

Rusdiyanto, Desa Babadan Kec. Patianrowo Nganjuk

Ampuhnya Dampak Korupsi

Setelah kegiatan pelatihan ini, ada satu harapan optimis yang lebih pasti, bahwa masih ada generasi bangsa yang peduli terhadap penanganan tindak korupsi yang selama ini kita rasakan akibatnya. Penanganan korupsi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh KPK dan sejenisnya pada akhirnya hanya bikin pusing masyarakat, berputar-putar bagaikan terbawa banjir bandang dengan skenario dan alur cerita yang tidak bermutu dan tidak mudah dipahami.

Padahal kita semua tahu, seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan dampak korupsi. Terbukti, masih ada anak-anak bangsa yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya, rakyat kita masih banyak yang makan nasi aking tanpa lauk, sarana prasarana sekolah, buruknya transportasi jalan, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah maupun petani yang tidak bisa menikmati hasil panennya. Sedangkan di kalangan TNI, POLRI, PNS, ikut-ikutan teriak kena imbasnya. Walaupun karena ulah pola hidupnya sendiri yang membuat hidup para pejabat itu amburadul. Segala tatanan sendi-sendi kehidupan hampir tak ada yang terlewat dari dampak derasnya arus korupsi.

Anehnya, pemerintah dengan bangganya mengumumkan pada masyarakat, tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Walaupun kami hanya rakyat biasa, Insya Allah kami tidak buta-butanya amat pada realita disekitar kami. Kepada pemerintah kami mengingatkan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung yang mengingatkan anda masih masyarakat, berarti masih ada jalan terbaik yang ditunjukkan Allah kepada bangsa kita. Daripada yang maha kuasa yang mengingatkan. Kita akan digulung bagaikan dadar gulung tanpa rasa-atau malah dengan rasa pahit. Marilah kita renungkan dan melakukan pencegahannya.

Hj. Lailatul Qadriyah, Desa Gebangkerep Baron Nganjuk

Bersama Punden Kita Berantas Korupsi

Judul tulisan ini jangan diartikan bahwa kami berani melawan korupsi jika didampingi oleh Punden. Maksudnya adalah bahwa pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan oleh PUNDEN telah berhasil memotivasi saya untuk ikut membarantas korupsi. Dulunya saya tidak mau tahu dengan masalah korupsi. Itu hanya urusan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa dan juga aparat yang berkepentingan di bidangnya. Saya sekarang jadi tahu, meskipun dengan hanya niat di dalam hati saja. Itu sudah menjadi bagian dari partisipasi dalam memberantas korupsi, apalagi bisa diterapkan dalam diri sendiri dan keluarga.

Bersama PUNDEN kita berantas korupsi. Artinya, berkat pelatihan anti korupsi kita bisa lebih tahu tentang apa korupsi, bagaimana tata cara korupsi itu dilakukan, batasan-batasan serta strategi advokasi baik hukum/non hukum. Bersama PUNDEN kita berantas korupsi. Semoga akan muncul relawan dan pahlawan yang ikut serta dalam memberantas korupsi.

Fathul Mungin, Desa Waung Kec. Baron Nganjuk

Anti Korupsi di Republik Korupsi

Saya mengikuti pelatihan ini anti korupsi ini meninggalkan anak-anak didik dan calon istri. Saya adalah guru yang memiliki tanggungjawab mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Saya juga belum beristri. Dengan berat hati akhirnya saya berangkat ke lokasi pelatihan ini. Dari rumah, saya menyimpan unek-unek yang menjadi pertanyaan saya tentang diadakannya kegiatan ini, yaitu: mengapa Pelatihan Anti Korupsi ini kok diperuntukkan bagi komunitas masjid? Mengapa bukan bagi komunitas koruptor saja? Seharusnya yang diundang itu golongan pejabat-pejabat yang cenderung melakukan korupsi saja. Itu lebih mengena dan tepat sasaran.

Ternyata pertanyaan hati saya tadi terjawab sudah di hari kedua pelatihan. Bahwa pelatihan ini penting bagi saya karena: *Pertama*, saya jadi lebih tahu yang bisa korupsi itu tidak hanya para pejabat. Seorang guru seperti saya pun bisa juga menjadi pelaku korupsi. Seperti mengurangi bacaan surat Al Fatihah dalam sholat itu juga disebut korupsi.. *Kedua*, saya bisa bersyukur hidup di republik korupsi. Karena korupsi juga telah memberikan kepada saya tantangan, terutama untuk mengukur kuat-tidaknya iman saya. Benar kata fasilitator bahwa setan tidak salah, karena mereka sudah mendapat tugas untuk menggoda manusia. Tinggal diri kita kuat apa tidak.

Intinya, walaupun saya terlahir dari republik korupsi saya akan melangkah maju tetap positif untuk tidak melakukan korupsi. Sikap ini akan saya tanamkan di lingkungan kehidupan saya, lalu mengajak orang-orang terdekat, teman di kampung, teman kerja dan seterusnya, sebab korupsi sudah jelas-jelas merugikan masyarakat, negara dan khususnya diri kita sendiri.

M.Slamet Widodo, Desa Banjaranyar Tanjunganom Nganjuk)

Awasi Dana Pemerintah

Banyaknya korupsi yang terjadi di sekitar kita karena lemahnya kontrol dari masyarakat. Saya rasa apa yang terjadi di lingkungan kita juga banyak terjadi dimana saja.

Jika terjadi penyelewengan bantuan yang seharusnya diberikan pada masyarakat, langkah yang dapat kita lakukan adalah bersama-sama menanyakan kepada pemerintah, baik di tingkat desa maupun di kecamatan. Penyalahgunaan dana bantuan selama ini terjadi, di samping ada permainan dari para aparat pemerintah itu sendiri, juga dikarenakan lemahnya pengawasan dari masyarakat. Sebagai masyarakat kita harus bisa mengontrol aparat pemerintah.

Kita bisa mengontrol dana bantuan yang ada desa melalui mekanisme lembaga yang ada didesa, misalnya LPMD dan BPD (Bada Perwakilan Desa) yang seharusnya bisa mengawasi jalannya pembangunan dan bantuan di desa. Musyawarah warga seharusnya bisa berjalan untuk mengawasi pembangunan agar lebih bisa terkontrol, sehingga setiap bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh mereka yang menjalankannya.

M.Mahfus, Desa Kemaduh .Kertosono Nganjuk

Dampak Korupsi dan Korelasinya

Seperti apa yang telah saya dapat dari pelatihan anti korupsi dari tanggal 5 - 11 Februari 2011 di hotel Wisata Karya Sawahan Nganjuk, bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, selagi orang tersebut mempunyai wewenang, tugas dan fungsi yang disalahgunakan untuk mengambil amanah demi kepentingan pribadi.

Adapun beberapa jenis tindak pidana korupsi antara lain adalah sebagai berikut: i) memberi/menerima hadiah/janji/penyuapan, ii) menggelapkan dalam jabatan, iii) pemerasan dalam jabatan, iv) ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri dan penyelenggara Negara), v) menerima gratifikasi, vi) pemerasan pajak, vii) pungli dalam pembuatan KTP – SIM, viii) penyelesaian perkara dengan uang/membeli hukuman. Masih banyak jenis korupsi yang lain.

Berbagai penyebab terjadinya korupsi yang antara lain:

- kurangnya gaji pegawai
- moral yang kurang kuat
- budaya yang di warisi dari orde baru - orde lama

- manajemen yang kurang baik
- ajaran agama yang kurang diterapkan
- gaya hidup konsumtif.

Korupsi sudah mengakar pada sendi-sendi pemerintahan dan masyarakat, dari pejabat tinggi sampai pejabat di desa. Contohnya apabila akan menyalurkan bantuan pasti terjadi pemotongan, sehingga bantuan yang diterima masyarakat tidak lebih dari 50% dari total dana bantuan. Ironisnya modus ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bagi para pejabat dan birokrat di Indonesia.

Perilaku korupsi dilingkungan birokrasi ini tentunya yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat umum. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi tidak bisa maksimal. Selain itu dampak dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan jajarannya ini juga berdampak pada lemahnya pelayanan pada masyarakat. Masyarakat banyak menjadi korban dari sistem pelayan publik ini yang selalu uang yang bicara. Berantas korupsi sekarang juga dan hukum berat para koruptor.

Lilik Masrukah Suhadi, Desa Warujayeng Tanjunganom Nganjuk

C. Berjamaah Kami Berantas Korupsi

Cinta Dunia

Menurut saya orang yang korupsi adalah orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Mereka tidak peduli bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia, walaupun dengan jalan korupsi. Seolah dunia adalah segala-galanya. Mereka lupa bagaimana kelak di akhirat.

Dari sini saya jadi teringat pada sebuah riwayat di jaman Nabi tentang seseorang yang sangat cinta dan mengejar kehidupan dunia semata. Suatu ketika, Rasulullah bertanya kepada dunia, “wahai dunia, siapakah kekasihmu?”, Lalu dunia menjawab, “Kekasihku adalah orang yang suka mencariku dan cinta kepadaku”. Rosulullah bertanya lagi...”Kemudian setelah orang menemukanmu dan orang itu sangat suka dan cinta kepadamu, apa yang kamu lakukan terhadapnya?. Maka duniapun menjawab: “Aku akan membunuhnya perlahan-lahan”.

Para pembaca yang budiman, begitulah akhir dari orang yang cinta kepada dunia. Salah satu pertanda terlalu cinta dunia adalah korupsi. Kita dapat lihat di media masa, para pelakunya adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia. Kenyataan membuktikan bahwa kehidupan para koruptor tidak pernah tentram. Hartanya tidak barokah, bahkan harta hasil korupsinya seakan membunuhnya dan, meruntuhkan kehormatan diri dan keluarganya.

Maka dari itu, marilah kita berlaku zuhud (mengekang ketamakan/keserakahan terhadap dunia yang fana dan selalu mengingat kehidupan akhirat) agar kita terhindar dari tipu daya dunia, termasuk penyakit yang mewabah di negara kita salah satunya korupsi. Naudzubillah Mindzalik. Selain itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Meningkatkan iman

dan taqwa kita kepada Allah agar kita selalu mendapat petunjuk dan lindungannya, Amin Yaa Robbal Alamin.

Hamka Bayu Wijaya, Desa Nglawak Kertosono Nganjuk

Fenomena Bangsa

Saya disini tidak menulis dengan panjang lebar. Kita semua sudah mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan menyelewengkan amanah. Secara agama, hal ini jelas bertentangan dengan aturan agama khususnya agama Islam.

Budaya korupsi di Indonesia sudah berjalan begitu lama, bahkan bisa dikatakan sudah mengakar pada diri pejabat-pejabat negara kita. Untuk memberantas korupsi di Indonesia sepertinya hal yang mustahil karena sudah menyebar ke seluruh sendi pemerintahan. Budaya korupsi itu terjadi hampir di seluruh instansi.

Akan tetapi, setelah kita belajar bersama dengan rekan-rekan dari Punden, kata 'mustahil' itu berubah menjadi kata 'bisa'. Asalkan kita konsisten dan tetap berjalan bersama dalam kelompok yang tertata (berjamaah), tidak ada kata mustahil. Untuk memberantas korupsi dibutuhkan kerja kelompok. Seperti kata orang tua dulu, untuk membersihkan sampah yang ada di perkarangan rumah kita, dibutuhkan seikat sapu lidi, tidak pernah cukup hanya dengan sebatang lidi. Begitukah pentingnya kerja berjamaah.

Pokoknya, jangan sampai ada kata menyerah untuk memerangi kejahatan dan korupsi. Karena kejahatan kalau dibiarkan akan merajalela. Tapi kalau ada upaya memeranginya, insya Allah kejahatan akan bisa berkurang. Untuk itu, mari kita melakukan aksi nyata untuk memerangi korupsi. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang terkecil

dulu, siapa tahu dengan seiring berjalannya waktu kita bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara ini. Amin.

Sudarsono, Desa Gemenggeng Pace Nganjuk

I Can Stop the Corruption

What Is Corruption (korupsi itu apa)?

Korupsi merupakan segala bentuk pencemaran terhadap amanah yang diembankan atau di berikan kepada seseorang. Korupsi juga disebut pengkhianatan amanah. Di era globalisasi saat ini tindakan korupsi semakin meningkat. Bentuknya pun bermacam-macam. Mereka (koruptor) mempunyai modus yang berbeda-beda namun sayangnya para koruptor itu tidak menerima hukuman yang seharusnya mereka terima. Inilah sebenarnya yang menjadi pertanyaan yang perlu saya sampaikan dan bagaimana cara mengatasi persoalan ini.

Memang beginilah fakta yang terjadi di negara Indonesia. Hal ini memang sangat perlu kita pikirkan bersama dan kita harus mencari atau menemukan solusinya. Ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Diperlukan adanya tekad dan usaha yang kuat oleh semua pihak yang masih peduli, dibutuhkan kekuatan, dorongan dan waktu yang tidak singkat. Karena Indonesia itu begitu luas dan saya seorang mahasiswa, saya yakin bahwa perjuangan untuk perubahan itu tidak mungkin saya lakukan secara sendirian dan dalam waktu yang singkat.

So that I can stop the corruption, lalu bagaimana caranya? Menurut saya beginilah cara dan tahapannya:

I. Memulai dari diri sendiri

2. Lingkungan keluarga
3. Tetangga, teman dekat dan seterusnya.

Perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya seperti jatuh dari langit. Perubahan itu harus diupayakan dan diciptakan bersama, harus direbut. *So, go on trying forever to against corruption. To all of Punden community. I say thank you very much.* Dengan adanya pelatihan ini saya lebih mengerti akan seluk beluk korupsi, semoga apa yang diberikan akan bermanfaat bagi saya dan kehidupan di sekitarku dalam hal pemberantasan korupsi.

Imroatus Sa'dyah, Ponpes Miftahul `Ula, Desa Nglawak
Kertosono Nganjuk

Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Korupsi adalah bentuk dari suatu perbuatan ketidakjujuran atau penyelewengan yang dilakukakan karena suatu pemberian. Sebenarnya korupsi itu sudah membudaya pada bangsa Indonesia. Korupsi sudah terjadi sejak dahulu dan kini sudah mendarah daging pada kehidupan bangsa ini.

Pada kesempatan ini, setelah dilatih selama tiga hari oleh Punden, kami telah mendapat wawasan bagaimana cara menanggulangi budaya korupsi. Seorang yang cenderung korupsi adalah orang yang berada (kaya) dikarenakan sifat rakus dan tamak manusia. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah para pejabat negara. Mereka sudah mendapatkan gaji yang tinggi dengan fasilitasnya yang banyak, tetapi karena lemahnya sifat manusia tersebut, maka sifat tamaknya akan timbul, mereka akan selalu kurang dan kurang. Mungkin karena kurang bersyukur maka terjadilah korupsi.

Dari permainan (baca: korupsi) para pejabat di atas, pastilah negara mengalami kerugian dan masyarakat menjadi miskin. Uang yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat malah masuk ke kantong pribadi para pejabat negara yang tamak dan rakus. Maka sanksi hukumlah yang akan diterima oleh para korupstor. Itupun kalau hukum ditegakkan dengan tidak pandang bulu.

Korupsi bisa terjadi dengan berbagai bentuk dan modusnya, contohnya pemerasan pajak, pembuatan KTP atau SIM dengan jalur pintas, tender suatu proyek, manipulasi pajak, dan seterusnya. Mereka para koruptor dengan berbagai cara sangat lihai untuk melakukan korupsi agar nafsu serakahnya bisa terpenuhi.

Dari kasus di atas, kita sebagai generasi bangsa yang sehat, harus melakukan strategi pemberantasan korupsi yang jitu. Strategi pertama, kita harus berkelompok ketika melakukan aksi anti korupsi, jangan sekali-kali melakukan secara individu. Kita harus melakukannya dengan berkelompok, berorganisasi. Dengan strategi ini sangat efektif dan juga kepercayaan diri kita akan kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Maka disini dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah mengambil hak orang lain yang sebenarnya bukan milik atau haknya. Dan para koruptor haruslah mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya yang telah membuat bangsa ini di rugikan dan masyarakat menjadi miskin. Hukum berat para koruptor melebihi hukuman para teroris.

Mutia Jihan, Desa Katerban Baron Nganjuk

Koruptor Tak Perlu Dilindungi

Dipandang dari sudut manapun korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum, terlepas dari rel yang ada,

baik hukum agama, hukum negara dan nilai-nilai kemanusiaan. Koruptor tidak perlu dilindungi, tidak menghalang-halangi siapapun untuk menjalani pemeriksaan atau proses hukum sekalipun orang yang terjerat adalah orang dekat kita. Entah itu keluarga, teman di pemerintahan, persekewanan dan sebagainya. Menegakkan keadilan memang harus buta. Tak pandang siapapun kecuali keadilan itu sendiri. Penegakan hukum bagi koruptor harus berjalan. Ujar presiden dalam jumpa pers di istana Negara Jakarta, Rabu (24/9) saya mengutip dari Kompas September Tahun 2008.

Korupsi harus dilawan. Dalam diri sifat manusia oleh Tuhan diberkati nurani yang berfungsi sebagai kodrat, titik kebaikan dalam diri manusia, dan juga dibekali nafsu yang mengarahkan kepada sifat keburukan dan akal sebagai penimbang.

Mayoritas bahkan mungkin semua orang dalam titik sadarnya mengakui korupsi perbuatan yang tidak baik yang harus di lawan dan jangan di tutup-tutupi. Pemerintah juga lagi giat-giatnya memberantas yang namanya tindakan korupsi ini. Hal ini tidak akan berhasil tanpa diawali dari diri sendiri. Kenapa saya katakan harus dimulai dari diri-sendiri dulu. Karena diri kita adalah bagian dari negara, apalagi diri-diri yang lain yang memiliki kuasa yang tentunya akan lebih dapat berdampak lebih besar pengaruhnya.

Saikhur Roji, Desa Malangsari Tanjunganom Nganjuk

Korupsi itu Menyesakkan

Terlalu sering kita mendengar kata korupsi melalui siaran pemberitaan, televisi, radio, atau bahkan langsung mendengar peristiwa korupsi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Namun, santernya berita itu tak sebanding dengan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh pemerintah SBY sejak awal pemerintahan.

Disadari atau tidak, kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya berjalan secara ideal sesuai dengan aturan main negara yang menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peran dan posisi serta tanggung jawab yang selalu mengiringinya. Inilah cita-cita dan tingginya harapan kita untuk bangsa yang beradab.

Perilaku egois yang menuntut adanya kebebasan tanpa batas, mengabaikan aturan yang mengarah pada sikap ingin menang sendiri. Pada ujungnya perilaku seperti ini sangat merugikan orang lain, baik personal maupun komunal dengan sengaja atau tidak bahkan mungkin bermental tidak peduli orang lain.

Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kesempurnaan, dalam bentuk mental kejiwaan yang terangkum dalam jasmani dan rohani. Dengan bekal itulah manusia disebut oleh Tuhan sebagai kholifah di muka bumi ini sebagai pengejawantahan Tuhan di dunia ini dalam rangka menjaga keseimbangan alam dan memimpin dunia.

Sifat dasar manusia, oleh Tuhan dibekali sebuah nurani yang fungsinya sebagai kontrol titik kebaikan dalam diri manusia terhadap kehidupannya, disamping dibekali nafsu yang mengarahkan kepada sifat, keburukan dan akal sebagai penimbang antara nurani dan nafsu.

Dalam logika sederhana, manusia seharusnya mampu membedakan sesuatu yang baik atau buruk. Ukurannya adalah manusia tidak bisa dibohongi atau membohongi hati nuraninya sendiri. Ketika ia melakukan kejelekan atau hal yang meletakan sesuatu tidak pada tempatnya, nurani kita juga pasti akan merasakan hal itu tidaklah benar, dan rasa di dalam hati sangatlah menyesakkan, bingung, gundah kalau sewaktu-waktu kebohongan itu terkuak dan ketahuan. Secara otomatis manusia itu berada dalam posisi yang tidak tenang. Kemana-mana selalu dihantui akan kesalahan dan kebohogan yang telah dilakukannya.

Berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan, awalnya memang terasa berat, akan tetapi pada tahap selanjutnya orang (manusia) itu akan merasa terbebas dan longgar tidak ada rasa bingung, gundah, atau bahkan ragu, karena pada akhirnya ia melakukan sesuatu yang benar dan pada tempatnya, sehingga dalam diri manusia itu tercipta sebuah kedamaian jiwa yang membawanya kepada ketenangan dihati manusia.

Arif Habibi, Desa Semanding Tertek Pare Kediri

Korupsi dan Iman

Korupsi dan Iman adalah dua kata yang selalu beriringan seperti sepasang kekasih. Keduanya adalah dua kata yang berbeda tetapi selalu menyatu. Korupsi bagaikan makanan yang lezat sedangkan iman adalah mulut yang siap melahapnya. Jika mulut ini tidak ada kuncinya, maka akan melahap semua yang ada tanpa memperhatikan baik buruknya. Jika iman tidak ada pengendalinya maka dia akan bertindak tanpa memperhatikan halal dan haram. Karena itu marilah kita berantas korupsi dengan iman.

Siti Mudawamah, Desa Bukur Patianrowo Nganjuk

Peranan Sekolah TPA/TPQ

Sebuah kejahatan yang sangat merugikan adalah korupsi. Korupsi bukan hanya berada dalam pemerintahan tingkat atas namun juga bisa di pemerintahan tingkat paling rendah sekalipun. Bahkan bisa juga di sebuah organisasi kecil, seperti di lembaga agama yang ada di dusun. Dan yang melakukan itu seolah tak merasa bahwa dirinya berdosa.

Memakan sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan

haram. Seakan ajaran-ajaran agama dikesampingkan dan tak dipedulikan lagi. Apalagi apabila tingkat keimanan seseorang itu masih sangat rendah. Makanya sedari dini sebisa mungkin anak-anak kita di perkenalkan dengan agama, yaitu dengan cara menyekolahkan di TPA atau TPQ terdekat.

Jika sudah besar nanti setidaknya anak-anak kita mempunyai bekal dan ilmu agama yang bisa di jadikan rem bila akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Setidaknya dengan membekali agama yang baik kepada anak-anak kita kelak akan dapat mencegah adanya korupsi. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. Amin.

Nur Inah Wati, Desa Watudandang Prambon Nganjuk

Jalan Menuju Korupsi

Manusia sebenarnya dilahirkan dalam keadaan suci, akan tetapi seiringnya waktu, pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Seseorang dituntut untuk mendapatkan uang yang banyak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

Korupsi dapat terjadi karena kurang bersyukur manusia kepada Allah SWT atas apa yang mereka miliki baik itu sandang, papan dan pangan. Hal-hal yang menyebabkan korupsi di sebagian besar penduduk Indonesia diantaranya yaitu:

1. Kurang menyukuri apa yang telah dimiliki
2. Kurangnya pendapatan setiap bulan
3. Pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran
4. Kebutuhan setiap hari meningkat

5. Ingin memperkaya diri secara cepat
6. Terjadinya kesenjangan sosial

Sebetulnya korupsi bisa dihilangkan pada setiap diri seseorang dengan cara selalu bekerja keras, bertanggungjawab, jujur, adil dan meyakini bahwa semua telah dibagi rezekinya oleh Allah SWT.

M. Adul Ghopur, Desa Watudandang Prambon Nganjuk

Sifat Keserakahan

Didalam diri setiap manusia, sifat serba kurang itulah yang menyebabkan gelap. Maka ketika di dalam pekerjaan ada peluang dan ada celah untuk menggelapkan sesuatu, dengan segala cara korupsi pun dilakukan karena merasa sifat merasa kurang ini. Celah korupsi di dalam pembangunan desa juga ada dan itu memberikan peluang bagi orang-orang yang punya niatan untuk korupsi.

Sebagai umat Islam yang taat pada agama, yang percaya bahwa ada kehidupan abadi setelah kehidupan ini, seharusnya takut untuk menyelewengkan dana milik orang lain. Apalagi itu milik orang banyak atau melakukan korupsi dalam bentuk apa pun.

Secara pribadi kita sendiri harus kuat untuk tidak korupsi dan semua keluarga harus mendukungnya, tidak justru mengajak hal-hal yang bersifat korupsi. Sehingga kehidupan keluarga akan sejahtera dengan jalan yang benar dan pekerjaan juga akan langgeng sampai akhir jabatan. Inilah sedikit pesan untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi para pembaca ada manfaatnya walaupun tulisan ini singkat.

Asrofah, Desa Watudandang Prambon Nganjuk

Metode Penghapus Korupsi

Mengguritanya korupsi di negara ini karena tidak adanya kesadaran tentang dampak akibat korupsi. Untuk itu sangat dibutuhkan penyadaran terhadap masyarakat maupun pejabat pemerintah yang *notabene* adalah pelayan rakyat (dari perangkat desa sampai presiden, penegak hukum dari polisi, jaksa, advokad, sampai MA). Juga para pengangguran, petani buruh pabrik, pedagang kaki lima dan penjual kehormatan. Kesadaran itu menyangkut sadar hak dan kewajiban. Sadar secara hukum, sadar politik dan sadar budaya.

Di pihak rakyat dan pejabat sama-sama sadar hak dan kewajiban masing-masing. Ada kebersamaan dalam berfikir positif dan ingin maju dengan keyakinan yang kuat pasti tidak akan terjadi korupsi. Apalagi jika hukum menjadi landasan perilaku, baik hukum dunia maupun akhirat yang sama-sama melarang berbuat korupsi. Tentu setiap orang akan takut melakukan korupsi.

Kesadaran itu juga dalam bentuk perilaku sehari-hari. Sehingga tidak menimbulkan budaya konsumerisme yang berarti melakukan pemborosan keuangan. Ini berlaku untuk wilayah pribadi maupun publik. Sehingga bisa efektif dalam mengontrol dan efisien dalam menggunakan anggaran. Kesadaran itu antara lain:

1. Menumbuhkan mental yang baik: Pemerintah tidak semena-mena dalam melakukan kewajiban yang diamanahkan oleh rakyat dan sebaliknya rakyat percaya dan mematuhi norma dan undang-undang yang ditetapkan oleh wakil yang sudah dipilih.
2. Moral yang bagus: Timbulnya perilaku yang baik dan terhapusnya pelanggaran hukum baik, dunia dan akhirat
3. Loyalitas tinggi: Sesuai kodratnya, manusia diciptakan untuk saling membantu. Siapaun mereka. Tidak mungkin saling merugikan (korupsi) kalau punya loyalitas

tinggi karena loyalitas tidak harus memberi materi (uang dengan cuma-cuma) atau instan tetapi demi kesejahteraan bersama.

Adi Sunyoto, Desa Sidorejo. Rejoso Nganjuk

Kuman-Kuman Kehidupan

Korupsi adalah penyakit ekosistem manusia dalam hidup bermasyarakat, bermartabat, berbangsa dan bernegara. Karena ditunjang adanya kesempatan dan ditopang dengan adanya kedudukan strategis maka runtuhlah ekosistem kehidupan seseorang sehingga menghalalkan segala cara demi kepuasan sesaat yaitu kenikmatan duniawi.

Kuman yang mewujud seperti penyakit ini hingga sekarang belum ada ditemukan obatnya sebab berhubungan erat dengan mental dan keyakinan seseorang dalam mengarungi hidup sebagai makhluk sosial. Maka sebagai masyarakat yang bermartabat kita harus dapat mencari solusi dengan jalan memulai dari kita sendiri. Negara melalui aparat pemerintah dan semua pihak harus dapat menjawab permasalahan ini dengan membuat aturan yang benar-benar bisa diterapkan agar tidak ada lagi koruptor yang memakan uang rakyat.

Tanamkan *roso eling* (selalu ingat) tentang adanya hukum sebab akibat. Ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. *.Nandur pari tukul pari, nandur telo uwoh telo, sopo cidro bakal ciloko* (Siapa menanam akan tumbuh padi. *Siapa menanam singkong akan* menghasilkan singkong. Siapa ingkar, dia akan celaka). Carilah kekayaan dengan jalan yang benar dan gunakan dengan benar pula. Itulah prinsip hidup yang bisa dikembangkan dalam diri agar tidak terjebak dalam perilaku korupsi yang merugikan orang lain.

Sukardi, Desa Garu Baron Nganjuk

Doa Anti Korupsi

Sebagai masyarakat awam, saya hanya mengerti korupsi dari berita, baik dari media cetak maupun televisi. Hampir setiap hari mereka memberitakan betapa rusaknya sistem di negara ini dan semakin meningkatnya kebiasaan orang yang memiliki jabatan suka melakukan tindakan korupsi. Baik dilingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif seperti sudah menjadi keharusan untuk menilep uang rakyat.

Anehnya lagi, dengan banyaknya uang mereka bisa membeli hukum untuk lolos dari jeratan hukum. Berbeda dengan kaum miskin yang tak punya uang dan kekuasaan. Salah sedikit saja dihukum berat. Keadilan untuk siapa memang tidak jelas dalam penegakan hukum di negara ini. Seolah hukum memang tidak berpihak pada kebenaran.

Asstaghfirullohal adzim, salah siapa ini? Tidak mustahil Allah akan menurunkan adzabnya dalam bentuk terjadinya bencana dimana-mana yang menimpa bangsa kita. Baik bencana di darat, di laut, maupun di udara. Mulai dari gunung merapi meletus, tsunami, kecelakaan pesawat terbang, kereta api dan rentetan bencana lainnya. Untuk itu sudah saatnya dilakukan taubat nasional untuk tidak lagi melakukan korupsi bagi semua elemen bangsa ini. Marilah kita berdo'a untuk bertaubat dari perilaku korupsi.

Moh. Muslih, Dusun Pandantoyo Kertosono Nganjuk

3 M

Untuk membudayakan anti korupsi maka:

1. Mulailah dari diri sendiri
2. Mulai dari hal terkecil

3. Mulai hari ini

Manusia adalah makhluk yang bertindak. Sebelum bertindak biasanya dilandasi oleh niat. Niat itupun dipengaruhi oleh keadaan. Tindakan yang dilakukan manusia juga bersifat rasional. Disengaja dan memiliki tujuan.

Seperti halnya dengan korupsi, korupsi merupakan tindakan yang rasional, disengaja dan bertujuan. Sayangnya setiap ada praktik korupsi pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan besar dan kecilnya kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi adalah tindakan yang normal dan manusiawi dan bukan suatu penyimpangan dalam hal kejiwaan. Namun sesuatu yang perlu dipertanyakan dalam hal nurani, ahlak dan moral.

Kalau kita amati secara mendalam, aturan-aturan yang diterapkan oleh penguasa di semua lini pemerintahan, sistem birokrasi, dan perekonomian justru malah menghasilkan peluang-peluang adanya praktik tindakan korupsi yang amat sangat aktif. Memang mustahil membarantas korupsi hingga nol persen. Yang tidak mustahil adalah upaya menekan peredarannya sehingga dampak kerugian dan angka yang dirugikan bisa diminimalisir.

Sebagai bangsa yang berniat memerangi korupsi, tindakan yang perlu dilakukan adalah reformasi total yang dimulai hari ini dan dari diri kita sendiri. Memulai dari hal yang terkecil dari pejabat tinggi sampai masyarakat terkecil. Juga sangat diperlukan adanya kegiatan sosialisasi pemahaman secara luas di masyarakat tentang dampak buruk dari tindakan korupsi. Sesering mungkin atau bahkan dimasukkan ke kurikulum sistem pendidikan nasional tujuan utamanya adalah menanamkan sikap mental anti korupsi di kalangan pelajar. Tidak saja untuk mereka di lembaga pendidikan formal tapi individu di lembaga non-formal juga digalakkan agar sikap anti korupsi membudaya di kalangan masyarakat.

Zainal Arifin, Desa Pandantoyo Kertsono Nganjuk

Korupsi, Ooh..Korupsi

Saya mendengar istilah korupsi ini ketika saya masih sekolah dasar (SD), ketika sedang bermain kelereng bersama teman-teman. Kalau ada salah satu teman yang main curang pasti dikatakan korupsi. Betapa malunya kalo dikatakan korupsi bahkan ada yang sampai menangis meminta maaf kepada teman bermainnya. Karena si anak yang curang tadi pastilah sudah tidak diajak bermain lagi dan pastinya akan diasingkan oleh teman-teman. Inilah sekelumit cerita bagaimana sebenarnya kita sejak kecil sudah di bekali kejujuran dan begitu berat sanksi apabila kita tidak jujur walaupun hanya kepada teman.

Saat ini kita semua tau, baik di lingkungan kita atau sekedar mendengar atau melihat di media masa baik cetak maupun elektronik terkait berita pejabat yang melakukan korupsi. Ada yang sudah di penjara, ada juga yang masih diproses hukum. Ada yang lepas dari jeratan hukum, juga ada yang masih mendekam di penjara meskipun di penjara tidak seperti narapidana pada kasus lainnya. Itulah Korupsi, penjahat korupsi selalu ada di mana-mana, dari lembaga swasta sampai pemerintah, dari pemerintahan paling bawah sampai pusat semua ada yang terlibat melakukan korupsi.

Kenapa korupsi bisa sampai terjadi. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya bukannya tak mengerti agama. Orang yang korupsi bukannya tidak tahu hukum, baik hukum agama maupun hukum pidana. Akan tetapi karena kesempatan dan lemahnya fungsi pengawasan akhirnya mereka bisa korupsi. Korupsi bisa dilakukan bersama-sama atau dilakukan sendirian oleh oknum pejabat. Akibat dari korupsi ini tentunya sangat merugikan masyarakat, karena yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya, masyarakat semakin miskin dan tak berdaya.

Korupsi masih bisa diberantas, dengan kesungguhan hati dan itikad baik semua anggota masyarakat secara bersama-

sama melakukan pengawasan. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, keluarga, sahabat untuk saling mengingatkan dan memberikan penyadaran agar tidak melakukan korupsi.

Saiful Khoizin, Desa Tanjungtani Prambon Nganjuk

Puisi Untukmu

Kamu selalu datang
Tak satu pun menghadang
Terus kamu terjang
Mekipun punya orang

Pagi,siang,sore,malam
Pikiranmu selalu dalam
Selalu menyelam
Dalam setiap kesempatan

Sudah banyak pintu dan ruang
Mencari sebuah peluang
Demi kantong mu yang selalu berlubang

Tak akan penuh meskipun diisi uang segudang

Kamu selalu datang

Silih berganti

Di setiap masa berganti

Tak akan berhenti

Selalu berganti

Sampai kapan kamu berhenti

Merampok uang kami

Oh...koruptor

Hukum akan menanti

Bagi semua yang ingkar janji

Janji untuk mengabdikan

Karena kamu sudah di gaji

Pandi, Desa Watudandang Prambon Nganjuk

Pentingnya Transparansi

Derap perjalanan sebuah organisasi apapun dan dimanapun, manakala manajemen atau aturan organisasi yang diaplikasikan adalah manajemen terbuka, maka bisa dijamin eksistensinya semakin mapan dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Kepercayaan suatu masyarakat terhadap adanya organisasi mutlak diperlukan bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Sebab tanpa adanya kepercayaan masyarakat, program apapun yang dicanangkan oleh organisasi akan mengalami perjalanan yang tersendat. Bahkan akan berdampak lumpuhnya program.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa transparansi manajemen akan berimplikasi positif bagi keberhasilan dan suksesnya suatu organisasi, sekaligus membudayakan sikap anti korupsi dilingkungan organisasi.

Moh. Bisri, Desa. Banjarsari Ngronggot Nganjuk

Jangan Menyerah

Terkait dengan maraknya korupsi di seluruh lini negeri ini, maka perlu adanya suatu perubahan dari korupsi menjadi tidak korupsi. Sebab tanpa adanya suatu perubahan tak mungkin itu bisa berubah. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya :”Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, apabila bangsa itu tidak mau merubahnya”.

Memang mengubah itu tidak mudah, pasti ada hambatan dan rintangan yang menghadang. Akan tetapi kalau kita mau terwujud sebuah perubahan yang kita cita-citakan, insya Allah Tuhan tetap akan memberikan jalan untuk merubah keadaan. Rintangan bisa karena faktor ekonomi, sumberdaya manusia (SDM) dan masih kurang solidnya organisasi, jamaah atau

golongan. . Akan tetapi kita tidak boleh menyerah sebelum bertempur walaupun teman perjuangan hanya dengan jumlah sedikit, jangan kecil hati. Dengan kesungguhan hati dan kerelaan bertindak insya Allah tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi.

Imam Syawafi, Desa Waung Baron Nganjuk

Reformasi Apalah Gunanya

Indonesia telah mengalami kepemimpinan beberapa kali. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Transisi dan sampai saat ini Orde Reformasi. Akan tetapi hingga kini bangsa ini masih berjalan di tempat, alias mandek. Kemiskinan masih tinggi, kesejahteraan rakyat jauh dari apa yang kita harapkan semula. Penyebabnya bukan karena bangsa Indonesia tidak mempunyai sumber daya alam yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan pula karena tidak memiliki landasan untuk sebagai pijakan pembangunan. Bangsa Indonesia memiliki semua itu. Indonesia mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah dan landasan hukum dalam setiap kebijakan pembangunan dibidang ekonomi hukum dan kebijakan lainnya. Tapi kenapa masyarakatnya masih miskin? Kenapa pendidikan begitu mahal, kenapa ingin berobat juga mahal. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua.

Salah satu penyebab dari semua ini adalah perilaku pejabat kita yang korup dan menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi. Seharusnya, bangsa Indonesia yang dikarunia Tuhan dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, tidak mengalami kondisi seperti sekarang ini.

Soal adanya biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal bagi rakyat, ini pasti ada yang salah di negeri ini. Korupsi telah melanda di seluruh pemerintahan di Indonesia dari kampung, desa sampai pemerintahan pusat. Tentunya kita semua bisa

melihat, mendengar, dan membaca bagaimana korupsi hampir tiap hari diberitakan di media baik cetak maupun elektronik. Miris tentunya kita menyaksikan semua berita itu. Karena korupsi sudah membudaya di negeri tercinta kita ini.

Lantas apa yang bisa kita lakukan? Sekarang atau menunggu kehancuran bangsa ini. Dalam upaya pencegahan tindak korupsi kita bisa memulai dengan diri kita sendiri, keluarga dan teman atau sahabat. Melalui aktifitas bersama atau lakukan penyadaran di lingkungan kita sendiri. Penyadaran tentang pemahaman anti korupsi bisa kita lakukan dimanapun, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Melalui majelis ta'lim, pengajian, dan kegiatan di pedesaan lainnya.

Kita mulai pencegahan korupsi ini dari lingkungan kita sendiri. Kita dapat memulai dari organisasi kita, komunitas, kelompok atau organisasi-organisasi apapun yang kita ikuti. Saling belajar dengan kelompok lain, saling mengingatkan sambil terus berupaya melakukan penyadaran kepada orang lain (pemerintah). Dari sinilah mungkin tindak korupsi dari level terkecil bisa kita cegah, melalui komunitas, kita tunjukkan bahwa kita bisa memberantas korupsi, semoga teman-teman akan selalu memegang teguh dengan apa yang telah kita dapat selama ini. Kita harus mampu berbuat sekecil apapun demi memberantas korupsi untuk menjaga umat dari kehancuran moral dan akhlak bangsa. Semoga.

Y. Edo Prasety, Desa Banaran Kertosono Nganjuk

Revolusi Budaya Sebagai Upaya Meminimalkan Korupsi

Korupsi bukan hanya menyangkut status permasalahan legal formal serta kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Tetapi korupsi juga

berbicara tentang *mindset* karakteristik dan budaya, hukum dan kebijakan dalam penerapannya. Karena memang korupsi butuh lebih dari sekedar pendekatan hukum dan kebijakan saja. Oleh karenanya dibutuhkan revolusi budaya untuk menghapus korupsi dari bumi Indonesia tercinta. Budaya korupsi memang harus dicabut dari bangsa ini sampai ke akar-akarnya.

Tidak mudah memang melakukan hal ini. Semua butuh kesabaran dan perjuangan keras, bahu membahu dengan seluruh elemen bangsa yang peduli terhadap nasib bangsa ini di masa depan. Tanpa kesabaran maka yang terjadi seperti pada jaman lengsernya Presiden Soeharto dulu, masyarakat terlalu bereforia akan terjadi perubahan di negeri ini. Akan tetapi kenyataannya rakyat semakin miskin dan sengsara. Maka belajar dari kegagalan itulah mari kita semua bersama berjuang mulai dari yang paling bawah di sekitar kita, di desa kita.

Desa merupakan bagian yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Desa sangatlah potensial untuk terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang acuh tak acuh terhadap perkembangan desanya. Masih bodoh karena sekian lama dibodohi. Masih miskin karena dimiskinkan oleh pembangunan.

Oleh karena itu saya menyakini bahwa pemberantasan korupsi masih bisa kita lakukan dengan semangat kebersamaan, komitmen dan kesabaran. Melalui gerakan komunitas organisasi di desa kita memulai dan bergabung dengan komunitas lain. Saling belajar dan memperkuat. Insya Allah tujuan kita akan berhasil minimal bisa mencegah korupsi di lingkungan kita sendiri.

Mohammad irawan Jauhari, Desa Banjaranyar Tanjunganom Nganjuk

Sepenggal Angan-Angan

Korupsi telah menjadi benalu bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini. Ibarat sebuah pohon biasanya benalu hanya bisa tumbuh di cabang besar dan ketika cabang itu dipotong maka hilanglah benalu yang menempel dan merugikan tersebut pohon tersebut. Namun kini benalu telah tumbuh dimana-mana. Tidak hanya di batang atau di cabang besar, di cabang kecil dan ranting pun telah ditumbuhi benalu. Bahkan sudah menjelajah ke batang dan daun. Dapat dikatakan kini benalu telah hinggap dan tumbuh di seluruh pohon.

Korupsi di Indonesia seperti benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama jalannya pemerintahan dan pembangunan. Korupsi telah terjadi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pemerintahan, akan tetapi telah terjadi di berbagai daerah sampai tingkatan terendah, yakni pemerintahan desa bahkan telah menjelajah dan memenuhi masyarakat di akar rumput.

Korupsi telah menjadi budaya bangsa. Menghilangkan atau memberantas sebuah budaya di masyarakat tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Diperlukan kerja keras melewati tahapan rumit yang harus dilakukan dan kesabaran yang tinggi. Tak kalah pentingnya juga membutuhkan pengorbanan. Andaikata kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bekerja dengan baik dan profesional, memegang teguh amanah rakyat dan negara maka seutuhnya tidak perlu lagi kita membentuk KPK atau membuat UU Tipikor atau membentuk Timtas tipikor dan sebagainya

Namun pada kenyataannya berkata lain. Walaupun sudah ada polisi jaksa, pengadilan tipikor dan yang lebih angker lagi KPK. Toh korupsi masih meraja-lela dan membudaya. Pertanyaan kemudian sebenarnya siapa yang salah? ada apa dengan negeri ini? Padahal semua agama telah melarang korupsi, negara juga telah memberikan aturan hukum dengan ancaman penjara namun tadi tidak jera juga. Maka selayaknya kita memikirkan

bagaimana memberantas korupsi dengan waktu yang relatif singkat.

Perluah kita Revolusi? Memilih jalan revolusi untuk memberantas korupsi adalah hal yang paling dianggap cocok dan tepat karena reformasi tidak akan menghasilkan apa-apa, cuma harapan semu. Kita tengok sebentar masa lalu betapa pentingnya revolusi sebagai sebuah jalan perubahan ketika jalan sudah tertutup dan ketika asa sudah deadlock, maka revolusilah jawaban satu-satunya. Lihat revolusi Iran, Turki, revolusi Perancis atau revolusi renaissance di Eropa ketika eropa lagi bingung dalam masa the dark middle age, yang selanjutnya melahirkan revolusi industri di Eropa.

Mungkin bagi sebagian orang mengatakan revolusi harus dibayar dengan harga mahal atau *high cost effect*. Namun tidak ada jalan lain, ibarat pohon yang penuh benalu dan tidak bisa diharapkan lagi manfaatnya. Mengapa pohon tersebut tidak ditebang saja alias diganti yang baru. Revolusi bisa ditempuh dengan cara menggalang masyarakat anti korupsi.

Amin Thohari, Desa Barontimur. Baron Nganjuk

Dampak Korupsi

Negara yang maju adalah negara yang mampu menghargai pejuangnya. Sekedar bertanya : apakah bisa dikatakan pejuang kalau mereka mengajari kita korupsi?

Korupsi..korupsi..korupsi.. inilah kata yang sering kita dengar setiap hari. Uang dan kekayaan itulah target dan sasarannya. Sebab orang itu merasa bahagia apabila hartanya melimpah dan kekayaannya semakin bertambah banyak. Tetapi sebenarnya korupsi itu tidak hanya menyangkut harta benda. Yang sering kita lakukan dan kita sadari adalah korupsi waktu sebab waktu yang kita korupsi tanpa kita sadari membuat diri kita menjadi bodoh.

Sebab banyak hal yang seharusnya kita lakukan tapi kita biarkan saja waktu terbuang sia-sia dan mubadzir.

Maka dengan semangat anti korupsi mari kita kurangi korupsi dari diri kita sendiri, dengan semangat itu kita perbaiki diri kita agar waktu yang selama ini kita buang, dengan sia-sia bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya hidup kita bisa terasa indah manis dan yang pasti bermanfaat. Kalau mau kita pasti bisa.

Untung Wiyono, Desa Wates Tanjunganom Nganjuk

Wabah Korupsi

Korupsi adalah wabah atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau ditanggulangi. Mengapa demikian? Karena kurang sejahteranya si manusia tersebut dalam lingkup ekonomi secara global. Mungkin orang-orang kaya dan mempunyai jabatan itu sudah sejahtera, tapi masih juga korupsi, tapi semua masih menjadi tanda tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Kuncinya adalah orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang yang tingkat keimanannya masih kurang, kurang bersyukur, baik kalangan muslim maupun non muslim.

Jika mereka mengaku beriman, sudah barang tentu tidak mengingkari suatu yang sudah diimaninya dan yang sudah menjadi keyakinannya. Inilah indikatornya agar mereka tidak berbuat korupsi.

Agung Setya Basuki, Desa Baron Nganjuk

Bersihkan Hati, Perangi Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang menyalahgunakan hukum. Banyak kejadian dan telah terbukti melakukan tindakan korupsi. Sebagai seorang pengamat saya menilai apa arti dan tujuan dari korupsi itu tidaklah lain hanyalah pemuas hati. Inilah awal dari terjadinya korupsi di ranah negeri tercinta ini.

Mereka kebal, mereka lebih pintar, mereka lebih terhormat, mungkin telah merajai dari pada kita sebagai rakyat kecil. Itulah jeritan suasana hati rakyat yang saat ini lagi marak-maraknya membahas masalah korupsi. Contoh saja Gayus Tambunan yang saat ini diperiksa lebih lanjut.

Masalah korupsi yang berawal dari "pemuas hati" memang benar, sebab keinginan itu berasal dari hati dan niat itu ada di dalam hati. Rosulluloh SAW bersabda: "Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya". Jadi jikalau niat itu sendiri sudah buruk maka sudah pasti perbuatanyapun menjadi buruk pula.

Tindakan korupsi itu bisa dapat kita cegah atau bahkan bisa ditumpas dari intinya, yaitu *kholbun* atau hati. Dimulai dari kepehaman arti mengenai korupsi pemahaman akan dampak yang ditimbulkannya. Kita bisa menyadari bahwa tindakan korupsi itu sudah pasti masuk dalam hal kategori kejahatan yang menunjukkan bagi diri pribadi lebih-lebih bagi orang lain.

Kesimpulannya adalah : *berantaslah korupsi dengan memahami artinya, memahami dampaknya, jadi perangilah hati kita sendiri dari sebuah kejahatan-kejahatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, khususnya dalam hal korupsi. Mari Berantas Korupsi... Bersihkan Hati Perangi Korupsi!*

Yeni Efendi, Desa Babadan Patianrowo Nganjuk

Judul-Judulan

Sejak pecah reformasi tahun 1998 saya sudah memerangi korupsi. Pada waktu itu saya dipercaya sebagai ketua reformasi di kampung saya. Alhamdulillah pada waktu itu kita dapat berhasil walaupun prosesnya sangat panjang dan besar taruhannya. Saya memang punya niat saya harus berhasil dalam membela kebenaran, tapi pada saat itu saya dalam posisi punya pekerjaan (penghasilan) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tapi sekarang, sebetulnya dalam hati punya niat membela kebenaran (memerangi korupsi), walaupun hanya tingkat pedesaan. Tetapi sekarang saya dalam keadaan tak punya pekerjaan.

Jadi kalau fokus masalah korupsi kami juga memiliki tanggungan anak dan istri. Insya Allah nanti kalau sudah punya pekerjaan lagi atau punya masukan/penghasilan untuk anak-istri, saya akan lakukan lagi perjuangan dalam menegakkan kebenaran, memerangi penyakit korupsi di desa kami.

Musilan, Desa Gemenggeng Pace Nganjuk

Lanjutkan Pemberantasan Korupsi

Sebenarnya banyak sekali arti dari kata korupsi. Salah satunya, korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Sebenarnya korupsi itu sudah ada pada zaman dulu. Pada era Presiden Sukarno saja sudah ada korupsi sehingga kita sebagai anak-cucunya mungkin juga mewarisi dengan apa yang telah dilakukan generasi pendahulu.

Pada kesempatan ini saya sudah mulai mengerti tentang korupsi, sebab-sebabnya dan dampak yang diakibatkannya.

Perilaku korupsi biasanya bukan dari golongan yang miskin atau penghasilan kurang, akan tetapi korupsi juga bisa dari kalangan orang kaya yang masih mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari diri sendiriyaitu sifat tamak dan rakus. Dampak korupsi yang paling jelas adalah negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat malah masuk ke kantong pribadi para pejabat.

Saat ini tindakan korupsi yang berhasil dilakukan oleh koruptor seringkali tidak mendapatkan sanksi hukum yang sesuai. Hal ini memicu tindakan korupsi lain. Syarat pemberantasan korupsi haruslah orang yang sangat terpercaya apalagi oleh orang yang salah dan tidak benar. Korupsi itu banyak terjadi dengan modus yang beragam. Contohnya jalur cepat dalam pembuatan KTP atau SIM bisa langsung tanpa dengan tes asal membayar jasa ke petugas atau memberikan sogokan uang, atau dalam kasus lain seperti pemotongan pajak dan lain-lain masih banyak lagi contohnya.

Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa mulai sedini berbuat agar korupsi di negeri ini bisa dihilangkan. Apalagi kita berpaku pada Al-Quran dan Assunnah, maka jangan sekali-kali kita berniat ingin menjadi koruptor, karena itu akan merusak negara dan agama islam itu sendiri dan perlu diingat apabila kita ingin membuka kasus korupsi jangan sekali-kali membuka dengan cara individu

Kesimpulan diatas bisa kita gali bahwa korupsi adalah produk dari sikap hidup individu atau kelompok yang mengandalkan uang sebagai standar kebenaran dan menjadi kekuasaan mutlak. Dampak yang besar adalah negara dirugikan khususnya rakyat yang menjadi korban oleh para koruptor.

Fitra Rahmawati, Desa Banjaranyar Tanjunganom Nganjuk

Mencegah dari Dalam

Korupsi terjadi karena aspek individu. Sifat tamak manusia menjadi pemicu orang melakukan korupsi. Bukan karena orangnya miskin atau penghasilan ekonominya tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat yang besar untuk memperkaya diri.

Unsur korupsi semacam itu datang dari dalam hati sendiri yaitu sifat tamak dan rakus, dan moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa terjadi melalui atasan teman sejawat, bawahannya ataupun pihak yang lain atau karena penghasilan yang kurang mencukupi.

Logikanya penghasilan seorang pegawai sudah cukup layak untuk memenuhi hidup yang wajar. Akan tetapi bila hal itu bukan menjadi penyebabnya maka seorang pegawai akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jika tergoda maka seorang pegawai akan dengan mudah korupsi untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan semacam ini yang memberi peluang besar untuk melakukan tindakan korupsi. Baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam harti curahan peluang itu untuk kepentingan diluar pekerjaan, yang seharusnya seorang koruptor harus diberantas semuanya.

Suparno, Desa Musir Rejoso Nganjuk

Korupsi yang Dijadikan Budaya

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan saya jadi lebih tahu apa itu korupsi. Ternyata pengertian korupsi itu sangat luas. Menurut KH. Musta'in Syafi'i korupsi itu adalah segala tindak pidana terhadap amanah yang diberikan. Korupsi identik dengan pengkhianatan sehingga efek hukumnya sangat berfariasi.

Dalam forum kemarin saya pernah ditanya oleh pak Jarwo yang menjadi fasilitator pelatihan, menurut anda apa itu korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah penyalahgunaan dana dari pemerintah atau lembaga. Sehingga korupsi itu menyakitkan dan sangat merugikan orang lain. Korupsi itu bagaikan benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Sesungguhnya ironis dengan semua yang terjadi di negeri tercinta ini. Saya berharap semoga para pelaku korupsi segera diberikan kesadaran untuk menjalankan amanah dari rakyat. Amin.

Budi Wibowo, Desa Gemenggeng Pace Nganjuk

Perlu Mukjizat

Kata 'korupsi' sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Hampir setiap lapisan, jika ditanya arti korupsi, semua orang pasti bisa menjawabnya walau kadang masih kurang tepat dalam mendefinisikan. Tetapi pada prinsipnya mereka sudah tahu arti kata korupsi adalah perbuatan yang tidak baik dan sangat merugikan bangsa dan negara.

Di Indonesia korupsi sudah sangat mewabah dan bisa diibaratkan seperti penyakit kronis yang menyerang pada seluruh bagian dan sendi-sendi tubuh di masyarakat, Sehingga dari sisi kesehatan perlu adanya mukjizat untuk bisa sembuh dan bisa bertahan hidup.

Begitulah kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Sehari-hari perbuatan korupsi sudah menjadi suguhan pokok yang secara langsung membentuk budaya hidup kita. Contoh dalam skala pemerintahan desa. Sudah dapat dipastikan bahwa ketika ada pemilihan kepala desa selalu ada praktik politik uang. Semuanya dianggap wajar saja. Para calon selalu tebar pesona dengan tebar uang, disamping memaparkan program-program.

Ajaibnya, janji-janji mereka terkadang terlalu muluk-muluk.

Adanya politik uang, jika dikembalikan dalam hitungan logis, tentu tidak ada manusia yang mau merugi. Tentu saja sang kepala desa yang telah terpilih akan berusaha mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya dengan melakukan perbuatan korupsi. Lebih celaknya lagi budaya korupsi sudah betul-betul mendarah daging di masyarakat kita, bahkan masyarakat dengan sadar melakukan tanpa sedikitpun merasa bersalah.

Contohnya saat warga mengurus KTP, harus memberi uang rokok (pelicin) pada saat meminta tanda tangan ke kepala desa. Walau Kades tidak meminta namun hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa, ditambah lagi dengan membayar pungutan disana-sini dengan alasan untuk biaya administrasi. Itu juga berlaku untuk pengurusan apa saja yang melibatkan aparat desa dalam hal mengurus surat-menyurat.

Dari konteks ilmu kesehatan, ibaratnya korupsi di Indonesia sangat sulit untuk di berantas atau disembuhkan. Sebab bisa diibaratkan sekitar 80 - 90% tubuh sudah terserang penyakit kronis dan dalam keadaan kritis. Jika diamputasi tentu berujung dengan kematian. Salah satu harapan hidup adalah “mukjizat” dengan terus berdoa dan memotivasi diri.

Tetapi harapan selalu ada, jalan keluar atau solusi masih bisa diupayakan walaupun kadang diluar kemampuan logika pikiran kita. Alam mempunyai siklus tertentu untuk menghapuskan dan memunculkan suatu peradaban baru. Alam akan mempunyai cara sendiri untuk pemurnian dengan caranya sendiri. Satu perubahan besar yang akan mengubah segalanya seperti perubahan dari jaman es ke jaman batu dan seterusnya.

Namun demikian kita semua harus tetap optimis dan berani mengawali dari diri-sendiri untuk mengatakan perang pada korupsi. Jangan terlalu banyak berharap pada kelompok atau orang lain untuk memberantas korupsi. Akan tetapi mulailah dari diri-sendiri dengan tindakan-tindakan nyata. Inilah hal

terkecil yang bisa kita lakukan sambil terus berdoa untuk adanya suatu mukjizat yang membawa perubahan besar-besaran , tetap semangat melawan korupsi.

Hendro Susilo, Desa Talang Rejoso Nganjuk

D. Tegakkan Hukum dan Keadilan

Hukum Untuk Si Miskin

Indonesia merupakan negara terkorup peringkat ke - 4 dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Ada seorang warga negara Indonesia yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan dimanamana. Kita semua pasti tahu bahkan semua orang tahu siapa dia. Dalam waktu sekejap dia telah dikenal luas oleh masyarakat. Di setiap stasiun televisi pasti ditayangkan gambarnya, Bahkan juga menjadi topik utama di surat kabar dan mendapat *rating* tertinggi di semua lini pemberitaan. Publikasinya mengalahkan artis sensasional Julia Perez dan Dewi Persik. Dialah Gayus Tambunan, siapa yang tidak mengenal sosok satu ini. Anak-anak kecil pun tahu siapa dia.

Gayus adalah tersangka korupsi di lingkungan kantor pajak. Tapi setelah kasusnya terungkap, yang terjadi hukuman yang dijatuhkannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap rakyat. Rakyat yang selama ini berusaha membayar pajak, tapi justru orang-orang seperti Gayus Tambunan yang merasakan nikmatnya pajak. Tapi lihat saja hukum Allah akan bicara. Ingatlah itu hai orang-orang yang berbuat korupsi. Pengadilan manusia di dunia bisa saja tidak mengadili dengan seadil-adilnya. Kelak keadilan Allah itu pasti benar. Allah yang akan mengadili dirimu seadil-adilnya. Tak satupun manusia yang lepas dari pengadilan Allah.

Itulah hukum di negara kita, Pengadilan seharusnya menjadi tempat memperoleh keadilan. Tetapi jaman sekarang sudah terbalik. Para penegak hukumlah (dari kepolisian dan kejaksaan) yang justru diadili. Ini menunjukkan hukum di Indonesia itu lemah, mudah dibeli. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk menerima uang suap atau pemberian dalam bentuk lain untuk mempengaruhi putusan

pengadilan. Kalau sudah seperti ini kepada siapa masyarakat percaya lembaga penegak keadilan? Latar belakang budaya Indonesia mungkin juga menjadi sebab terjadinya korupsi.

Hukum di Indonesia hanya untuk permainan orang-orang kaya dan punya jabatan, sehingga kalau terkena masalah akan dibeli dengan uang. Lain halnya dengan orang-orang miskin, sedikit saja melakukan kesalahan, mereka sudah harus dipenjarakan.

Negara kita memang mempunyai banyak kebudayaan yang luhur, tetapi dengan sekejap tercoreng oleh orang-orang yang gila harta, gila pangkat dan kedudukan. Jadi bisakah semua komponen bangsa ini bersatu dengan satu tujuan yakni memberantas korupsi di negeri ini? Mari kita berantas tikus-tikus berdasi secara bersama-sama. Insya Allah negara kita akan aman, damai, dan makmur bangsa kita.

Siti Mahmudah, Desa Gebangkerep Baron Nganjuk

Lucunya Negriku

Hukum bisa dibeli bagi warga yang memiliki kekayaan melimpah. Berbeda bagi warga negara yang tidak memiliki kekayaan alias miskin. Mereka hanya bisa menerima keputusan dengan terpaksa. Mereka tak punya uang untuk mengatur jalannya persidangan dengan mereka. Berbeda dengan mereka yang punya uang banyak. Sejak awal mereka bisa atur semuanya..

Semestinya keadilan bisa ditegakkan bagi siapapun. Hal tersebut bisa diatasi dengan pemilihan jaksa yang benar-benar amanah dan mengerti hukum sehingga keputusan yang diambil benar-benar adil dan bermanfaat. Juga pemilihan hakim haruslah melalui jalur yang seharusnya tidak dengan praktik korupsi, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam persidangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Apabila hal tersebut diatas dilakukan dengan benar, Insya Allah keadilan di negeriku bisa ditegakkan. Yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan sehingga hukum tidak tergantung dari berapa banyak uang yang kita punya tapi rasa keadilan yang lebih diutamakan. Semoga saja.

Hendrik Hermawanto, Desa Tanjungtani. Prambon Nganjuk

Kemlade (benalu) Desa (Kujual Kambingku)

Selama ini dibenakku korupsi bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi di kabupaten, kecamatan, desa, bahkan di dusun-dusun. Seperti pengalamanku waktu kelahiran anakku masih di pungut biaya. Padahal aku di desa tergolong orang yang tidak mampu, tetapi aku tidak pernah diberi kartu ASKIN (Asuransi) oleh perangkat desaku. Sehingga biaya kelahiran anakku disuruh bayar dan harus lunas sampai-sampai kambingku cuma satu yang kondisinya mau melahirkan aku jual.

Kambing itu satu-satunya harapanku supaya berkembang dan bisa menjadi modal usahaku. Apa boleh buat. Akhirnya kambingku harus kujual buat bayar biaya kelahiran anakku. Itupun tidak cukup, sampai aku harus pinjam bank titil (semacam lintah darat) dengan bunga yang tinggi. Sebenarnya itupun belum mampu melunasi ongkos persalinan. Dengan terpaksa anak istriku aku bawa pulang ke rumah dengan syarat nantinya harus melunasi kekurangan pembayarannya.

Dari pengalamanku ini tentu saya sangat berharap pemerintah menindaklanjuti program ASKIN yang belum disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Supiyon. A.D., Desa Babadan Patianrowo Nganjuk

Hukum yang Berkadil

Menurut saya korupsi adalah mengambil hak orang lain dengan sengaja, baik sedikit atau banyak. Tindakan untuk memberantas korupsi bagi saya adalah dengan cara menanamkan pendidikan agama yang kuat di masyarakat. Karena orang yang paham agamanya akan takut berbuat curang. Orang tersebut mengerti benar terhadap pentingnya meninggalkan perbuatan tidak jujur atau korupsi karena takut dengan azab yang terjadi menimpanya kelak setelah kehidupan dunia ini.

Ada sebuah contoh yang sangat mudah kita jumpai dalam penegakan hukum yang tidak adil. Misalnya ketika seseorang mencuri tapi dihukum tidak setimpal (tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku) dan status orang tersebut menjadi bebas. Hal ini adalah contoh yang buruk bagi masa depan penegakan hukum yang benar-benar adil bagi mereka yang melanggar.

Harapan saya, penegakan hukum harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sehingga orang yang melakukan kesalahan kecil hukumannya jangan diperberat. Begitu pula sebaliknya orang yang melakukan korupsi jangan dibebaskan begitu saja. Saya sangat percaya dan yakin bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah pengadilan Tuhan. Tuhan maha tahu, Tuhan tidak tidur, pasti orang yang bersalah tetap akan mendapat balasan langsung dari Tuhan didunia ini maupun di akhirat nanti.

Nanik Sri Rahayu, Desa Banjarsari Ngronggot Nganjuk

Semut Tak Akan Tersenyum Bila Diinjak

Ngomong soal korupsi barangkali merupakan sarapan pagi atau menu setiap hari bagi kita, karena hampir setiap waktu baik melalui media cetak maupun media elektronik menyuguhkan berita korupsi. Kita semua selalu disuguhi berita korupsi, apakah di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hampir semua lini tersebut terserang virus korupsi. Mulai dari "istana negara" sampai ke pelosok desa-desa. Semua ruang telah dimasuki budaya korupsi.

Barangkali korupsi bagai daun berguguran di musim kemarau. Satu jatuh, belum disapu, telah jatuh yang lainnya. Belum sempat membersihkannya sudah jatuh lagi-jatuh lagi, Terus kapan bersihnya? Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah putus asa atau pesimis kalau bicara soal pemberantasan korupsi. Karena ibarat sakit, sudah kronis atau komplikasi. Jadi harapan untuk sembuh sangat kecil sekali, bahkan saya pernah diskusi dengan tokoh masyarakat karena sangat pesimisnya bercampur jengkel, dia bilang siapapun presidennya korupsi tidak bisa diberantas. Kemudian saya bertanya, lha bagaimana cara memberantas korupsi itu sendiri? Dia jawab tunggu azab Tuhan datang, seluruh wilayah Indonesia lenyap menunggu suatu kehidupan baru mulai dari titik nol.

Yang jelas siapa pun orangnya dan apapun kastanya boleh-boleh saja berkomentar. Boleh saja berpendapat karena bersuara dilindungi oleh undang-undang. Terlepas itu rasional atau tidak itu urusan belakangan. Kalau saya barangkali masih punya rasa optimis jika korupsi di Indonesia bisa diberantas, asalkan seluruh komponen bangsa ini sadar dan berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Meskipun membuat sadar seseorang untuk tidak korupsi itu bukan hal yang mudah. Mungkin lebih tepat kalau ingin memberantas korupsi harus dipaksa dengan undang-undang

dengan substansinya memberikan sanksi hukuman yang seberat-berantanya bagi pelaku korupsi atau koruptor, hukuman rajam, hukuman gantung, atau hukuman potong tangan yang lebih penting lagi kita sebagai rakyat kecil harus bahu membahu bergandengan tangan secara erat lewat komunitas yang ada guna ikut berperan mempengaruhi para pengambil kebijakan, baik pada eksekutif, legislatif semaksimal mungkin, Kalau tidak bisa evolusi, revolusi saja.

Imam Syafi'i, Desa Banjaranyar Tanjunganom Nganjuk

Hukumilah Koruptor Dengan Potong Tangan

Korupsi sudah menjadi budaya di negeri kita ini. Korupsi ibarat tumbuhan yang sudah mengakar kuat pada semua lini, pada semua sektor kehidupan, baik dalam pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, daerah maupun di tingkat kecamatan, desa, dusun, bahkan RT serta RW.

Dibutuhkan waktu yang lama untuk menghapus atau menghilangkan budaya korupsi. Ini karena korupsi sudah sistemik, struktural dan kultural. Tindakan korupsi jelas-jelas melanggar nilai-nilai agama. Perilaku korupsi jelaslah bukan orang yang amanah (terpercaya) karena telah mengambil hak/mencuri milik orang lain. Dan mencuri dalam hukum islam haruslah dipotong tangan, karena penjara bagi seorang koruptor justru menjadi surga, karena penjara telah disulap menjadi surga seperti kasus suap Artalita Suryani yang mampu membayar penjara menjadi tempat hiburan (ber-AC, dan disediakan tempat bermain anak).

Bagus Rudiyanto, Desa Baron Kecamatan. Baron Nganjuk

Hukum Apakah Yang Pantas Bagi Koruptor

Sebenarnya apakah yang membedakan antara koruptor dengan pencuri, perampok, penjudi bahkan teroris. Menurut UUD 1945 tentunya sama warga masyarakat kedudukannya sama di depan hukum. Tetapi kenapa seorang pencuri di hukum 7 bulan, perampok tahunan, penjudi 8 bulan, dan bahkan tersangka teroris mendapat hukuman mati. Lalu berapa tahun hukuman yang layak bagi seorang koruptor?

Bukankah korupsi itu sangat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara dan bahkan bisa memiskinkan jutaan rakyat. Di tempat lain, bahkan ada juga yang kelaparan dan mati yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Tetapi kenapa hukuman bagi koruptor selama ini sangat ringan jika dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Masih segar dalam ingatan kita seorang narapidana koruptor, lalu seenaknya bisa plesiran keluar negeri. Apakah itu yang dinamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saya tidak sependapat dengan hal itu. Kalau saya lebih setuju hukuman tembak di tempat bagi tahanan kasus korupsi. Karena hal ini sangat mengganggu kestabilan ekonomi, membuat rakyat menjadi miskin dan sebagian dari jutaan orang kelaparan yang diakibatkan tindak kejahatan korupsi.

Hendry Eko Susanto, Desa. Malang Sari. Tanjunganom Nganjuk

Masalah Korupsi Indonesia

Saat ini arah tujuan dan misi penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi tidak jelas lagi. Pembentukan satuan tugas (baca: satgas anti korupsi) merupakan langkah berani dan sekaligus menyatakan pengakuan tentang keberadaan mafia hukum dalam praktek peradilan yang terjadi selama 65 tahun sejak kemerdekaan Indonesia.

Mafia hukum di Indonesia memiliki kekuatan destruktif terhadap ketahanan negara dan keajiban negara termasuk lembaga penegak hukum. Pertaruhan nasionalisme dan keteguhan dalam pemberantasan mafia hukum di dalam negeri, namun pembentukan Satgas mafia hukum bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi keberadaan mafia hukum itu sendiri.

Menurut saya dalam memerangi korupsi seharusnya bukan dengan jalan membentuk satgas mafia hukum akan tetapi memperkuat keberadaan KPK serta memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum yaitu antara KPK, Polri dan kejaksaan. Bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun korupsi akan tetap merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan rakyat. Pada hakikatnya korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama jalannya roda pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam praktek korupsi sangat sulit dihambat bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas karena sulitnya memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak disamping sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Mereka bisa mencari celah untuk mensiasati hukum.

Dampak perbuatan korupsi merupakan bahaya yang harus diwaspadai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang mengandalkan uang sebagai standar kebenaran hidup

dan kepuasan mutlak. Sebagai akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan politikus korup yang berlebihan uang bisa masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat luas.

Beberapa yang menjadi sebab terjadinya korupsi adalah gaji yang rendah, kurang sempurnanya perundang-undangan warisan pemerintah kolonial Belanda atau sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara tidak layak. Akibatnya pemborosan sumber modal yang lari ke luar negeri dan ketidakpercayaan investor terhadap penanaman modal di Indonesia serta terbuangnya bantuan keahlian untuk meningkatkan SDM kita.

Untuk itu dalam penanggulangan korupsi harus ada kesadaran rakyat untuk memikul tanggungjawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dan bersifat acuh tak acuh, menanamkan aspirasi nasional yang positif yaitu mengutamakan kepentingan nasional dan para pemimpin dan pejabat memberikan teladan dalam memberantas dan menindak pelaku korupsi.

S. Naryo, Desa Mlorah Rejoso Nganjuk

Korupsi Penyakit Akut Bangsa

Korupsi di Indonesia adalah salah satu penyebab penghambat pembangunan. Laju pembangunan berjalan terseok-seok yang pada akhirnya nanti mengakibatkan Indonesia akan terkalahkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pembangunan di Indonesia hanya akan berjalan ditempat karena ibarat sebuah bangunan yang tiangnya keropos digerogeti oleh korupsi.

Korupsi di Indonesia benar-benar sudah menjadi wabah penyakit kronis yang dapat di istilahkan “pagebluk” yaitu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat secara bersamaan. Disana-sini

kita dengan sangat mudah dapat menemukan penyakit ini, baik dikalangan atas maupun bawah. Bahkan dana BOS untuk Madin (Madarasah Diniyah) pun tak luput dari ganasnya penyakit ini.

Muh. BISRI, Desa Sambiroto Baron Nganjuk

Korupsi Sejak Pra Manusia

Dari segi bahasa “korupsi” berasal dari bahasa Inggris yaitu corrupt dan atau diabdos dari bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol/runtuh. Inilah arti bahasa dari kata korupsi.

Sebenarnya korupsi sudah ada sejak sebelum nabi Adam ada. Dalam kata lain korupsi ada sebelum manusia ada. Penjelasan tentang adanya makhluk sebelum adam adalah didalam QS. Surah Al Hijr 15:24 yang artinya *”Allahlah yang lebih mengetahui penciptaan manusia yang terdahulu dan yang akan datang”*. Inilah dasar bahwa memang ada makhluk lain yang menghuni bumi sebelum kedatangan Adam. Makhluk itu dinamakan *bannul jann* (mirip manusia). Sehingga pemeliharaan dan pengembangan bumi ini diamanahkan kepada *bannul jann*.

Singkat cerita, karena ada diantara *bannul jann* yang ingin mendapat fasilitas yang lebih dengan cara selalu merugikan yang lain yaitu merebut fasilitas milik yang lain. Di zaman sekarang disebut korupsi. Maka dimulai dari masalah kecilpun bisa jadi isu besar yang akhirnya menimbulkan peperangan. Dalam perkembangannya perang ini menjadi kebiasaan sampai mendapat kecaman dan kritikan dari malaikat yang konon melahirkan sebuah resolusi dari Allah.

Bannul jann harus dihancurkan dari muka bumi, dan selanjutnya kekholifahan (pemimpin dan pengelolaan) bumi diserahkan pada manusia. Pada awalnya kurang mendapatkan respon positif, dari para malaikat. Allah maha mengendaki dari segala penciptanya.

Berabad-abad manusia memerintah bumi, walau bagaimanapun manusia merupakan masyarakat yang kompleks dan pada akhirnya juga ada sebagian yang mengkhianati amanah suci ini. Sehingga pada perkembangannya juga menimbulkan kerusakan, baik alam maupun manusia. Pada dirinya sendiri maupun orang lain.

Karena korupsi menimbulkan kerusakan-kerusakan maka pemberantasan korupsi juga dipandang wajib karena juga sebagai sunnatullah sebagaimana hukuman Allah yang telah dilakukan oleh Allah terhadap *bannul jann*. Korupsi adalah tindakan penodaan terhadap amanah yang dibebankan padanya dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan. Sebagai proses sosial maka diperlukan strategi pemberantasan dan bentuk-bentuk hukum pelanggaran terhadap pelaku korupsi. Selain secara sistem pemberantasan korupsi harus diberantas dengan praktis, baik pembinaan mental maupun spiritual. Yang jelas jika tindak pidana korupsi tidak kita hancurkan, maka kita akan dihancurkan akibat korupsi atau semuanya akan dihancurkan Allah dalam episode akhir atau kiamat.

Abdul Syukur, Desa Wates Tanjunganom Nganjuk

Korupsi dan Solusinya

Kenapa korupsi begitu mewabah di negeri tercinta ini? Karena mental bangsa ini, yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda, yang akhirnya membentuk kepribadian priyayi atau pegawai yang identik dengan kerajaan dan kemalasan (kurang kreatifitas). Jiwa pegawai atau *amtenaar* itu hinggap melekat pada kalangan muda terdidik yang lebih suka menjadi pegawai dari pada berwira usaha. Para sarjana berebut menjadi pegawai. Lihatlah jumlah sarjana yang menginginkan menjadi PNS dibandingkan dengan lowongan PNS yang dibutuhkan tidak berimbang dengan banyaknya masyarakat yang menginginkan menjadi PNS yang kemudian membuka peluang untuk korupsi di bidang rekrutmen pegawai negeri sipil.

Pada gilirannya jabatan/posisi yang diperoleh secara KKN dengan cara menyogok menjadi PNS itu akan menghasilkan para aparatur negara yang memanfaatkan jabatannya untuk mengembalikan uang sogokan yang telah dikeluarkan dan tentu saja mereka pasti akan berlaku korup di instansinya.

Solusinya adalah rekrutmen pegawai sesuai aturan, ajarkan agama dengan benar dengan pendekatan akhlaqul kharimah, tingkatkan pendidikan seperti lokakarya yang membahas isu korupsi dan kembangkan ekonomi masyarakat disektor riil secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu ini bukan satu-satunya solusi akan tetapi bisa memperkaya khazanah strategi pemberantasan korupsi yang memang membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Moh. Asrofi, DP, Desa Katerban Baron Nganjuk

Harus Ada Sosialisasi

Hingar bingar pembangunan ternyata menyisakan pertanyaan besar. Mampukah pemerintah baik pusat maupun desa menyalurkan semua program yang ada di masyarakat secara adil untuk rakyat.

Pada kenyataanya pembangunan selama ini hanya segelintir warga saja yang bisa menikmati, bahkan warga (desa) tidak tahu dengan adanya program-program yang selama ini digulirkan di desa. Bagaimana pengawasannya kalau masyarakatnya saja tidak di kasih tahu. Kalau mau mengkritik ujung-ujungnya pasti akan dipersulit ketika kita punya kepentingan administrasi di desa. Akhirnya mimpi pembangunan bisa dinikmati masyarakat semakin jauh terkubur oleh kesulitan mencari sesuap nasi. Inilah faktanya.

Nur Azizah, Desa Watudandang Nganjuk



* IBARAT KA., HIDUP HARIUS BERDALAM DI ATAS REL / ATURAN / HUKUM

* LURUS. AMANAH. CERDAS. TRANSPARAN ADALAH SIKAP YG TELAH KAMI TERAPKAN U MELAWAN KORUPSI

KORUPSI PELAKUNYA DILAKNAT ALLAH
 PERLUNYA KETELADANAN PEMIMPIN U/ TOK KORUPSI

ISBN :

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

INDONESIA

Telp +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>